



---

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

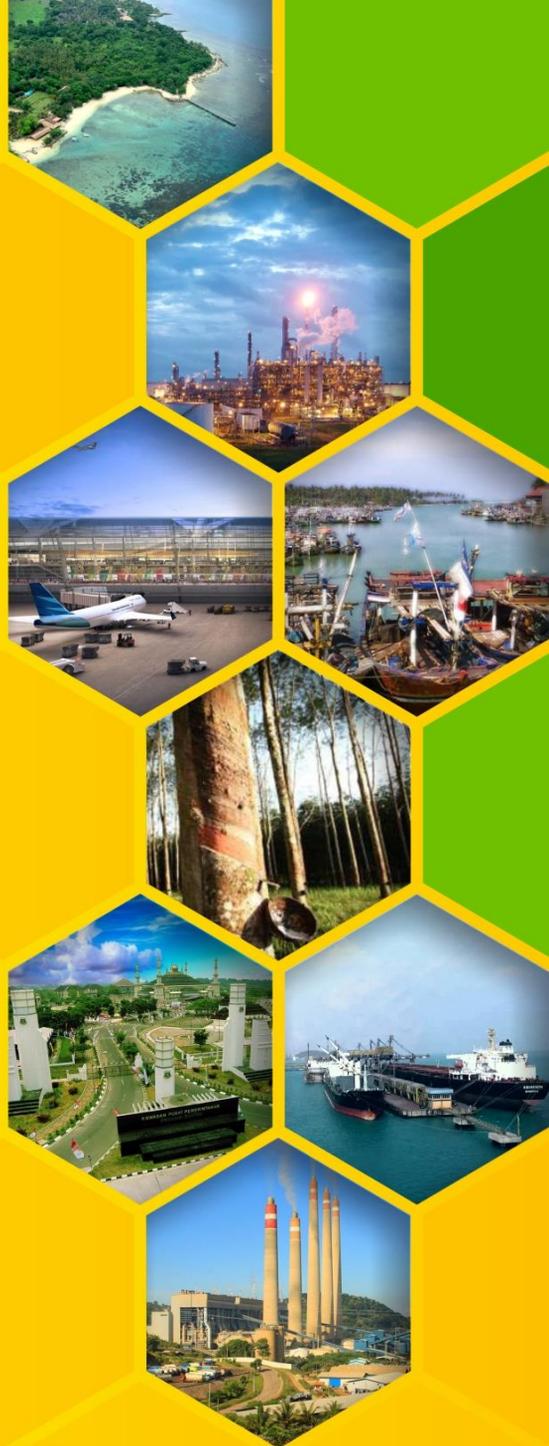
---

# **ANALISIS PEREKONOMIAN KOTA TANGERANG**

---

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

---



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.*

Rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya dokumen **Analisis Perekonomian** dapat tersusun sesuai jadwal yang ditetapkan.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola data statistik ekonomi Kota Tangerang untuk menyediakan informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel yang memberikan gambaran kondisi ekonomi Kota Tangerang sumber informasi bagi semua pihak.

Sebagai lembaga yang mengampu tanggung jawab tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang memandang perlu melaksanakan pekerjaan **Analisis Perekonomian** untuk menginventarisasi, mengklasifikasi, mengklarifikasi, memvalidasi, dan menyajikan data dan informasi ekonomi Kota Tangerang agar mudah diakses, dengan prinsip pengelolaan yang efektif, proporsional dan akuntabel.

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen ini. Mudah-mudahan koordinasi dan kerjasama yang telah dibangun dapat terus dibina dan ditingkatkan.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.*

Banten, 2022  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1-01
1.2. Maksud, Tujuan, dan Keluaran .....	1-03
1.3. Ruanglingkup Pekerjaan .....	1-04
1.4. Dasar Hukum .....	1-05
1.5. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan .....	1-05
1.6. Sistematika Penyajian .....	1-15
<b>BAB 2 TINJAUAN TEORI, KEBIJAKAN, DAN PENDEKATAN</b>	
2.1. Tinjauan Teori .....	2-01
2.2. Pendekatan .....	2-27
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH</b>	
Kajian Empiris .....	3-01
<b>BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2019-2024 yaitu meningkatnya Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan(ADHK) per kapita per tahun menjadi lebih sekitar 58 juta/orang/tahun .....	4-02
4.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam RPJMN Periode 2019-2024 yaitu Pertumbuhan PDRB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2024 .....	4-05

- 4.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam RPJMN Periode 2019-2024 yaitu Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%) dan akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%) .....
- 4.4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam RPJMN Periode 2019-2024 yaitu terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.....
- 4.5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam RPJMN Periode 2019-2024 yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 4,5% terhadap PDB pada tahun 2020 (2020:4,0%) dan meningkatnya jumlah wisatawan\ mancanegara menjadi 17 juta pada tahun 2024 (2020: 4,05 juta) .....

## **BAB 5 PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan..... 5-1
- 5.2. Saran ..... 5-3

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan tertaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pilar Pembangunan Bidang Ekonomi merupakan pilar baru yang meliputi penyediaan energi untuk semua, yang merupakan faktor penting baik untuk pendidikan, pelayanan kesehatan maupun penurunan kemiskinan. Penyediaan energi tidak hanya harus dengan harga terjangkau namun juga mengutamakan penggunaan terbarukan yang diiringi dengan efisiensi konsumsi energi (Goal 7). Pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu tinggi, tetapi perlu pertumbuhan yang berkelanjutan secara kemampuan fiskal, maupun pertumbuhan yang tidak membahayakan lingkungan hidup dan pengembangan peluang kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, yang didukung pengembangan kesempatan kerja yang produktif dan decent (Goal 8). Dalam kaitan ini termasuk goal untuk industri yang

berkelanjutan, inklusif, memanfaatkan inovasi yang didukung infrastruktur yang ramah lingkungan dan berdaya tahan (resilient) (Goal 9). Goal 10, mengurangi kesenjangan yang merupakan Goal baru, berperan penting untuk diselesaikan dan akan sangat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan partisipatif. Prinsip no one left behind sangat terkait dengan pelaksanaan pengurangan kesenjangan. Selanjutnya, Goal 17. Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan, terdiri dari isu dan langkah di bidang ekonomi yang perlu diwujudkan untuk ekonomi berkelanjutan, dan merupakan pilar penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Belajar dari pengalaman pelaksanaan MDGs yang mengabaikan kerjasama antara Negara dan peran serta tanggung jawab Negara maju dalam melaksanakan agenda pembangunan global, maka dalam SDGs dirumuskan kerjasama global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Goal 17). Rumusan secara eksplisit, tentang cara dan instrumen kerjasama global akan dilakukan melalui dukungan finansial melalui ODA maupun cara lainnya: melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas, tata cara perdagangan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam mengatasi kesenjangan antar Negara. Sementara itu, di dalam negeri, juga dilakukan melalui mobilisasi sumber daya domestik melalui perbaikan pengelolaan pajak dan keuangan Negara, kerjasama antara pemerintah dan swasta, serta kerjasama dengan para pihak lain yaitu Filantropi dan LSM. Dengan adanya tatakelola baru ini, maka ketiga pilar pembangunan berkelanjutan akan dilaksanakan dengan baik secara inklusif, melibatkan semua parapihak serta akan dapat kau setiap warganegara (no one left behind).

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Targettarget TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Demikian halnya target-target TPB/SDGs di tingkat Kota Tangerang telah pula sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Berdasarkan uraian tersebut Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika mencoba untuk menguraikan data-data Pilar Pembangunan Ekonomi untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs dengan merujuk pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang (RPJMD 2019-2023)

## 1.2. Maksud Tujuan Sasaran dan Keluaran

**Maksud** dari pekerjaan Analisis Perekonomian Kota Tangerang adalah tersedianya informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel yang memberikan gambaran kondisi data-data pilar pembangunan ekonomi Kota Tangerang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi semua pihak.

**Tujuan** Analisis Perekonomian Kota Tangerang antara lain:

1. mengidentifikasi data-data pilar pembangunan ekonomi Kota Tangerang;
2. menginventansiasi gambaran data-data pilar pembangunan ekonomi Kota Tangerang;
3. menyeleksi informasi data-data pilar pembangunan ekonomi yang ditampilkan;
4. menyusun informasi data-data pilar pembangunan ekonomi sebagai media informasi di Kota Tangerang

**Sasaran** dari Analisis Perekonomian Kota Tangerang antara lain adalah sebagai berikut:

1. teridentifikasi data-data pilar pembangunan ekonomi Kota Tangerang;
2. terinventarisasi gambaran data-data pilar pembangunan ekonomi Kota Tangerang;
3. terseleksi informasi data-data pilar pembangunan ekonomi yang ditampilkan;
4. tersusunnya informasi data-data pilar pembangunan ekonomi sebagai media informasi di Kota Tangerang.

**Keluaran** (output) yang diharapkan dari pekerjaan Analisis Perekonomian Kota Tangerang pada prinsipnya dapat menyajikan potret perkembangan data-data pilar pembangunan ekonomi Kota Tangerang secara informatif dan mudah dipahami

### 1.3. Ruanglingkup Pekerjaan

Pada tahap pelaksanaannya, kegiatan ini memiliki beberapa dimensi, sebagai berikut

#### **Dimensi Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Analisis Perekonomian Kota Tangerang adalah 3 (tiga) bulan dimana 1 bulan terdiri dari 22 hari kerja;

- a. persiapan pengadaan dan mobilisasi;
- b. pelaksanaan survey;
- c. pelaksanaan analisis; dan
- d. pelaporan;

#### **Dimensi Wilayah Kegiatan**

Lingkup wilayah Analisis Perekonomian Kota Tangerang adalah Wilayah Administrasi Kota Tangerang

### **Dimensi Materi**

Analisis Perekonomian Kota Tangerang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi data-data pilar pembangunan ekonomi Kota Tangerang;
2. Identifikasi informasi data-data pilar pembangunan ekonomi secara detail;

### **1.4. Dasar Hukum**

Kegiatan ini didasarkan pada beberapa regulasi berikut;

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032.
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023

### **1.5. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan**

Sesuai dengan output yang diinginkan, maka survey dan pengumpulan data yang dilakukan mencakup:

#### **Data Sekunder dan Surveynya**

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut juga dengan metode penggunaan bahan dokumen. Sebab dalam hal ini, peneliti

tidak secara langsung mengambil data sendiri tapi meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data merupakan suatu fakta atau gambaran yang dikumpulkan dan nantinya akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi suatu penelitian, dimana dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- **Jenis statistik** berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- **Hasil statistik** yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- **Sistem Statistik** Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- **Menyediakan kebutuhan** data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- **Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya**, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- **Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi** statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia

### Data Primer dan Surveynya

Data primer berasal dari narasumber primer dan data lapangan langsung Sesuai dengan maknanya di dalam KBBI, data primer adalah jenis data utama atau pokok di dalam suatu penelitian. Proses pemerolehan data ini didapatkan langsung dari tangan pertama, atau sumber utama dari fenomena yang sedang dikaji, biasanya, sumber akan diperoleh dari sumber primer secara langsung, tanpa perantara. Sumber primer ini maksudnya adalah orang-orang yang mengalami secara langsung peristiwa tersebut.

Karena mereka mengalami secara langsung, maka disebut sebagai sumber primer. Harapannya adalah karena mengalami secara langsung, mereka dapat menjelaskan dengan lebih baik peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Selain itu, proses pengambilan data secara langsung ke sumber primer ini diharapkan dapat menghasilkan data yang berkualitas lebih baik. Hal ini terjadi karena pewawancara tentu saja memahami substansi pertanyaannya. Berbeda jika memanfaatkan data sekunder yang berasal dari hasil penelitian ataupun narasi orang lain, data primer memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- Bersifat Utama
- Data dihasilkan Secara Langsung

### **Cara Pemerolehan Data Primer**

Data primer dapat diambil dengan wawancara, survei, dan observasi. Secara umum, terdapat 3 cara untuk mendapatkan data primer yaitu lewat wawancara, observasi, dan melakukan survei. Berikut ini adalah pendetailan mengenai ketiga metode perolehan data tersebut.

#### **Wawancara**

Wawancara adalah salah satu jenis pengumpulan data yang paling sering diandalkan dalam penelitian kualitatif, apalagi dalam pengumpulan jenis data primer. Alasannya adalah karena wawancara bisa dilakukan dengan menggunakan informan utama sehingga data yang dihasilkan juga memiliki tingkat keakuratan tinggi serta keaktualan yang tinggi.

#### **Observasi**

Observasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melihat dan mengamati suatu objek atau fenomena untuk mengambil suatu kesimpulan. Karena observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung, maka data yang dihasilkan dianggap sebagai data primer.

#### **Survei**

Berbeda dengan wawancara yang bersifat mendalam terhadap suatu individu, survei mencoba untuk mendapatkan gambaran umum sentimen suatu kelompok masyarakat. Survei sebagian besar pasti akan menggunakan metode pengisian angket ataupun kuesioner. Alasannya adalah karena pada penelitian kuantitatif, mengetahui kuantitas atau jumlah dari gagasan yang diteliti sangat penting, bahkan menjadi poin utama dalam penelitian tersebut.

### **Keunggulan Data Primer**

Karena data primer merupakan data yang diambil secara langsung di lapangan dan merupakan data khusus yang diambil untuk suatu penelitian, umumnya data seperti ini memiliki akurasi yang lebih baik. Secara umum, berikut ini adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh data primer dibandingkan dengan data sekunder.

- Akurasi yang lebih tinggi karena data yang diambil aktual dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
- Kustomisasi yang lebih tinggi karena kita yang mengambil datanya, kita bisa langsung mempengaruhi jenis-jenis data tersebut akan seperti apa. Jadi, data yang ada pasti cocok dengan penelitian kita.
- Relevansi tinggi karena data diambil secara langsung saat penelitian, data tersebut pasti relevan dengan kondisi lapangan dan dapat menggambarkan dengan baik fenomena yang terjadi.
- Dapat menjadi data utama dari sebuah penelitian karena memiliki faktor kepercayaan yang umumnya lebih tinggi

### **Kelemahan Data Primer**

Karena harus diambil secara langsung, terkadang data primer sulit untuk didapatkan atau setidaknya membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, tidak banyak yang bisa mendapatkan dan menggunakan data primer.

Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan yang ada pada data primer dalam sebuah penelitian

- **mahal** karena harus diakuisisi secara langsung ke sumbernya, terlebih lagi daerah susah diakses dan minim infrastruktur;
- **membutuhkan waktu lama**, sama seperti alasan diatas, tidak mudah dan murah untuk mendapatkan data primer;
- **butuh keterampilan lebih dalam** mengakuisisi dan mengolahnya. Seperti yang sudah kita ketahui, data primer tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus diolah terlebih dahulu menjadi bentuk data yang dapat dipahami oleh semua orang. Hal ini membutuhkan keterampilan yang tinggi dan tidak semua orang memilikinya.

Mengingat ketersediaan data populasi yang tidak diketahui secara pasti maka opsi penentuan sampel menggunakan cluster sampling dengan menggunakan prinsip nonprobability sampling.

Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persolan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam kajian ini digunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulannya guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa data:

#### 1. **Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, perihal yang harus dilakukan adalah merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai focus kajian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum, dipilih hal

– hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

2. **Penyajian data (data display)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam kajian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan kajian sebelum disusun dalam bentuk laporan.

3. **Menarik kesimpulan dan verifikasi**

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti – bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

Penelitian kualitatif menemukan fakta – fakta yang banyak dan beragam, dan dari fakta–fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti. Pada langkah ini, upaya yang harus dilakukan adalah menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai focus penelitian.

**Statistika Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari caracara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap.

Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan.

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1995). Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007). Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data (Kuswanto, 2012). Salah satu ukuran pemusatan data yang biasa digunakan adalah mean (Fauzy, 2009). Selain dalam bentuk ukuran pemusatan data juga dapat disajikan dalam bentuk salah satunya adalah diagram pareto dan tabel. Berikut ini penjelasan mengenai mean, diagram pareto, dan tabel.

1. **Mean**, adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data.
2. **Diagram Pareto** adalah serangkaian diagram batang yang menggambarkan frekuensi atau pengaruh dari proses atau keadaan atau masalah. Diagram diatur mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah dari kiri ke kanan (Shahindra, 2008).
3. **Tabel** adalah daftar berisi ikhtisar dari sejumlah fakta dan informasi. Bentuknya berupa kolom-kolom dan baris-baris. Tabel merupakan alat bantu visual yang berfungsi menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada kata-kata. Sajian informasi yang menggunakan tabel lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Bentuk tabel yang sering digunakan adalah tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel kontingensi untuk data kualitatif dengan banyak kategori dalam baris maupun kolom (Hassan, 2001)
4. **Grafik** merupakan gambar yang terdiri atas garis dan titik-titik koordinat. Dalam grafik terdapat dua jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X yang berposisi horisontal dan garis koordinat Y yang vertikal. Pertemuan antara setiap titik X dan Y membentuk baris-baris dan kolom-kolom. Umumnya grafik

digunakan untuk membandingkan jumlah data. Selain itu, digunakan pula untuk menunjukkan fluktuasi suatu perkembangan jumlah, misalnya dalam rentang waktu lima tahun, enam tahun, sepuluh tahun, atau lebih. Dengan grafik, perbandingan serta naik turunnya suatu jumlah data akan lebih jelas. Penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram bertujuan untuk memvisualisasikan data secara keseluruhan dengan menonjolkan karakteristik-karakteristik tertentu dari data tersebut. Jenis grafik atau diagram yang sering digunakan diantaranya adalah histogram, diagram batang dan daun, diagram garis, diagram lingkaran dan diagram kotak. (Hassan, 2001).

5. **Data**, menurut Widodo (2014), pengertian data adalah angka yang mempunyai makna atau yang memberikan informasi. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih bersifat mentah, sehingga memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

- a. **Data Berdasarkan Skala Pengukuran**

Dalam statistika jenis data berdasarkan skala pengukuran menurut (Nugraha, 2011) ada empat jenis data berdasarkan skala pengukuran yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah rasio. Skala pengukuran rasio menurut Nugraha (2011) adalah berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Nol mutlak artinya nol yang memiliki arti tidak ada. Ukuran pemusatan data untuk skala pengukuran rasio menggunakan mean, median, dan modus (Widodo, 2014). Contoh data rasio menurut Fauzy (2011) antara lain pendapatan, produksi bola lampu, berat badan, dan lain-lain.

**b. Data Berdasarkan Sumbernya**

Menurut Widodo (2014) jenis data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung melalui penelitian dan hasilnya dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau dari penelitian sebelumnya

**c. Data Berdasarkan Sifatnya**

Sifat data menurut Widodo (2014) terdiri dari dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam angka atau kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif disebut juga data non metrik sedangkan data kuantitatif disebut data metrik. Data non metrik terdiri dari data dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Kemudian data metrik terdiri dari data dengan skala pengukuran interval dan rasio

### **Kerangka Kerja Logis**

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan ringkasan fenomena yang menunjukkan tingkatan tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja. Matrik/diagram KKL sebaiknya selalu diperbaiki sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perkembangan perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Kerangka Kerja Logis yang merupakan struktur pendukung untuk membangun kerangka berfikir sesuatu bisa diidentikkan sebagai rangka yang berdiri kokoh untuk mendukung atau menopang sesuatu yang akan diputuskan.

Kerangka kerja logis digunakan secara luas karena mengharuskan berpikir terorganisir, dapat menghubungkan kegiatan-investasi-hasil, dapat digunakan untuk menetapkan indikator kinerja dan mengalokasikan tanggung jawab, dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dapat juga digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dapat memperhitungkan resiko.

## 1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian **Penyusunan Analisis Perekonomian Kota Tangerang** ini adalah sebagai berikut:

### **Bab 1. Pendahuluan**

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, keluaran, hasil dan sasaran, metodologi dan sistematika penulisan laporan.

### **Bab 2. Tinjauan Teori Kebijakan dan Pendekatan**

Bab ini membahas atau mendeskripsikan tinjauan teori yang mendasari kajian ini yang utama didukung oleh teori dan kebijakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

### **Bab 3. Gambaran Umum Wilayah**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kota Tangerang dari beberapa aspek, khususnya aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial

### **Bab 4. Analisa dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan analisa statistik deskriptif dari berbagai komponen ekonomi yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan (SDGS) di Kota Tangerang periode 2022..

### **Bab 5. Penutup**

Pada bab ini, disimpulkan atas intepretasi statistik deskriptif data dan informasi ekonomi Kota Tangerang, sesuai dengan komitmen global yang tertuang dalam dokumen SDGS serta menyarankan agar target dan sasaran dapat tercapai sesuai kurun waktu yang sudah diagendakan.

## BAB 2

# TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

### 2.1. Tinjauan Teori

#### 2.1.1. Teori Pembangunan Ekonomi

**Menurut Mazhab Historismus** pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Dalam alam pikiran mazhab ini fenomena ekonomi adalah produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam perjalanan sejarah. Mazhab ini mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman selama abad XIX sampai awal XX.

**Menurut Friedrich List** sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi, jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. Perkembangan ekonomi, menurut List, melalui 5 tahap yaitu tahap primitif, beternak, pertanian, pertambangan dan industri pengolahan (manufacturing), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi tersebut berdasarkan pada "cara produksi" nya. Selain itu, List juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien.

**Menurut Bruno Hildebrand** perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada "cara produksi" ataupun "cara konsumsi", tetapi pada "cara distribusi" yang digunakan. Oleh karena itu Bruno Hildebrand mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

1. Perekonomian Barter (natura);
2. Perekonomian Uang;
3. Perekonomian Kredit;

**Menurut Karl Bucher** sintesa dari pendapat List dan Hildebrand, dimana perkembangan ekonomi melalui 3 tahap yaitu:

1. Produksi untuk kebutuhan sendiri (subsistem)
2. Perekonomian kota di mana pertukaran sudah meluas.
3. Perekonomian nasional di mana peran pedagang menjadi semakin penting.

Berdasarkan Teori Klasik, melalui gagasan-gagasan Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus menunjukkan bahwa para pemikir dari mazhab klasik menganut pandangan yang luas tentang kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem analisis para pemikir dalam mazhab klasik didasarkan atas saran pendapat, seakan-akan perkembangan ekonomi berjalan dalam keadaan pasar bebas dengan persaingan yang sempurna tanpa adanya unsur monopoli. Sistem analisis mazhab klasik berkisar pada proses akumulasi pembentukan modal secara kumulatif (modal fisik maupun dana). Proses akumulasi tercipta oleh adanya surplus antara hasil produksi, konsumsi dalam masyarakat atau tabungan. Tabungan dilakukan dengan maksud untuk disalurkan sebagai investasi untuk menambah alat-alat produksi, menambah modal fisik dan dana. Melalui proses akumulasi, maka kemampuan memproduksi meningkat (Djojohadikusumo, 1994:28).

**Menurut Adam Smith** Cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal yang terjadi pada suatu negara. Adanya akumulasi modal yang bersumber dari tabungan, maka para pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya pada sektor riil. Akumulasi modal dan investasi tergantung pada perilaku menabung masyarakat. Proses pertumbuhan ini terjadi secara simultan, artinya pertumbuhan ekonomi merupakan mata rantai tabungan, akumulasi modal, dan investasi. Jika investasi rendah, maka kemampuan menabung akan turun, sehingga akumulasi modal akan mengalami penurunan pula sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi (Smith dalam Mudrajat, 1997:39).

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi karena penambahan modal (sebagai input) akan secara langsung meningkatkan output. Pengaruh tidak langsung terjadi apabila stok modal meningkat maka semakin besar pula dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas perkapita sehingga menghasilkan pertumbuhan output (Smith dalam Arsyad, 1999:56).

**Sedangkan menurut David Ricardo**, pola proses pertumbuhan ekonomi pada mulanya jumlah penduduk yang rendah dan kekayaan alam yang relatif cukup banyak mengakibatkan para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi, tingginya tingkat keuntungan akan menciptakan tingkat pembentukan modal yang tinggi pula, sehingga menaikkan produksi (Ricardo dalam Sadono, 1985:276), kemudian dalam ekonomi masyarakat yang sudah ada kegiatan di sektor industri, maka investasi bisa dilakukan pada tingkat yang memadai. Hal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menambah produksinya, dan pada tahap selanjutnya menaikkan tingkat hidup (meningkatnya pendapatan perkapita) (Ricardo dalam Djojohadikusumo, 1994:28).

Akumulasi modal atau investasi terjadi pada tingkat keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi. Akumulasi modal cenderung meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ricardo dalam Arsyad, 1999:60).

**Menurut Thomas Robert Malthus**, peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin tercapai tanpa penanaman modal terus-menerus. Sumber akumulasi modal adalah laba yang berasal dari tabungan yang disisihkan dari keuntungan yang meningkat dan bukannya dari pengeluaran untuk barang mewah dan barang-barang untuk kesenangan. Selain itu juga diungkapkan tentang “kecenderungan tertinggi untuk menabung”, yang berarti bahwa tabungan berasal dari persediaan yang sebenarnya dipersiapkan untuk konsumsi yang bersifat mendesak dan menambahkannya pada persediaan yang dimaksudkan untuk

memperoleh laba atau pengkonversian pendapatan menjadi modal (Malthus dalam Jhingan, 2003:98).

Kemudian, teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik lahir dan dikembangkan oleh **Robert Solow dan Trevor Swan** sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solow (Arsyad, 1999) menyebutkan bahwa peran kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pandangan teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Ini berarti bahwa sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Menurut teori Neo Klasik, rasio Modal-Output (COR) bisa berubah. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Suatu proses yang merupakan perubahan terus menerus dan berkesinambungan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan merata pada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa:

1. ada keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Bahwa pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Pembangunan ekonomi menduduki tempat utama dalam pembangunan dewasa ini. Akan tetapi tidak mengabaikan unsur sosial budaya, dan lainnya mendapat perhatian yang seimbang;
2. pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air; dan
3. pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan masyarakat maju.

Demikian juga tercantum dalam Trilogi Pembangunan yang isinya antara lain (Sastratmadja,1985:11): pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan ekonomi mencakup perubahan tata susunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai perubahan struktural. Perubahan struktural itu merupakan perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Djojohadikusumo, 1994:47).

Dalam pada proses itu, pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumberdaya produksi, perubahan pada pola pembagian kekayaan dan pendapatan diantara para pelaku ekonomi. Dengan demikian pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan. Kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material.

Peningkatan taraf hidup masyarakat mencakup suatu perangkat cita-cita meliputi:

1. pembangunan harus bersifat rasionalistis, artinya bahwa haluan yang diambil harus berlandaskan pada pertimbangan rasional, berdasarkan fakta, sehingga nantinya merupakan suatu kerangka yang sinkron.
2. adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan. Artinya, adanya keinginan untuk selalu membangun pada ukuran dan haluan yang terkoordinasi secara rasional dalam suatu sistem.
3. peningkatan produktifitas.
4. peningkatan standar kehidupan.
5. kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat dan sama di bidang politik, sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan.
6. pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah ditunjukkan oleh pergeseran peranan pemerintah dari posisi yang sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada peningkatan kemandirian daerah. Kebijakan-kebijakan pembangunan haruslah didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengerahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah

bersama masyarakat harus mengambil inisiatif pembangunan daerah.

### 2.1.2. Teori Kebutuhan

Hierarki kebutuhan Maslow merupakan teori interdisiplin yang berguna untuk membuat prioritas asuhan keperawatan. Hierarki kebutuhan dasar manusia termasuk lima tingkat prioritas. Dasar paling bawah atau tingkat pertama termasuk kebutuhan fisiologis, seperti udara, seks, air dan makanan. Tingkat kedua yaitu kebutuhan keamanan dan perlindungan, termasuk juga keamanan fisik dan psikologis. Tingkat ketiga berisi kebutuhan akan cinta dan memiliki, termasuk didalamnya hubungan pertemanan, hubungan sosial, dan hubungan cinta. Tingkat keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan diri termasuk juga kepercayaan diri dan nilai diri. Tingkat terakhir merupakan kebutuhan untuk aktualisasi diri yaitu keadaan pencapaian potensi dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan kehidupan (Potter dan Perry 2009).

Ada empat tingkatan kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow yaitu:

1. **Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)** adalah kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam Hierarki Maslow. Sehingga seseorang yang belum memenuhi kebutuhan dasar lainnya akan lebih dulu memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan ini memiliki delapan macam seperti: kebutuhan oksigen, cairan, makanan, eliminasi urin, istirahat, aktivitas, kesehatan temperatur tubuh, dan seksual (Mubarak & Chayatin 2007). Keselamatan dan Rasa Aman (Safety and Security Needs) adalah kebutuhan yang perlu mengidentifikasi jenis ancaman yang bisa membahayakan bagi manusia. Maslow memberi contoh hal-hal yang bisa memuaskan kebutuhan keselamatan dan keamanan seperti tempat dimana orang dapat merasa aman dari bahaya misalnya tempat penampungan seperti rumah yang memberikan perlindungan dari bencana cuaca (Robbert J, et.al2013).

2. **Kebutuhan akan rasa cinta** setelah seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan, mereka menjadi termotivasi oleh kebutuhan akan cinta seperti keinginan untuk berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi bagian sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, dan lingkungan masyarakat. Cinta dan keberadaan mencakup beberapa aspek dari seksualitas dan hubungan dengan manusia lain dan juga kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan cinta (Feist Jess & Feist Gregory 2010).
3. **Kebutuhan harga diri** memiliki dua komponen yaitu: a) menghargai diri sendiri (self respect) adalah kebutuhan yang memiliki kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. b) mendapat penghargaan dari orang lain (respect from others) adalah kebutuhan penghargaan dari orang lain, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan dan apresiasi. Kebutuhan harga diri apabila tidak terpuaskan maka akan menimbulkan canggung, lemah, pasif, tergantung pada orang lain, penakut, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup dan rendah diri dalam bergaul. Menurut Maslow penghargaan diri dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri kepada diri sendiri. Orang seharusnya memperoleh harga diri dari kemampuan diri sendiri, bukan dari ketenaran eksternal yang tidak dapat dikontrolnya, yang membuatnya tergantung kepada orang lain (Alwisol 2004).
4. **Kebutuhan aktualisasi diri** adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri (Self fulfillment), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Kebutuhan aktualisasi diri ini yaitu kebutuhan untuk ingin berkembang, ingin berubah, ingin mengalami transformasi menjadi lebih bermakna (Alwisol 2004). Kebutuhan ini merupakan puncak dari hirarki kebutuhan manusia yaitu perkembangan atau perwujudan potensi dan kapasitas secara penuh. Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi untuk menjadi segala

sesuatu yang dia mampu untuk menjadi yang diinginkan. Walaupun kebutuhan lainnya terpenuhi, namun apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi maka seseorang akan mengalami kegelisahan, ketidaksenangan atau frustrasi (Syamsu & Juntika 2007).

Hirarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau paling tidak kebutuhan yang lain terpenuhi sebelum kebutuhan level tinggi menjadi hal yang memotivasi. Lima kebutuhan yang membentuk hirarki adalah kebutuhan konatif (conative needs), yang berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan ini memiliki karakter mendorong atau memotivasi (Feist Jess & Feist Gregory 2010).

Menurut pandangan Maslow, kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Dalam model hirarki ini, kebutuhan manusia yang lebih rendah harus terpenuhi sebelum mementingkan kebutuhan yang lebih tinggi (Howard & Miriam 2006).

### 2.1.3. Teori Kesejahteraan

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan et al, 2006), yaitu:

- 1) kesejahteraan subjektif dan
- 2) kesejahteraan objektif.

Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat **individu**, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat **keluarga**, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat **masyarakat**, beberapa contoh dari indikator objektif diantaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Fergusson et al., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminology yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare, dan quality of life*. Menurut Just et al., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari willingness to pay saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert et al., 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu:

- a) peluang berusaha;
- b) peluang bekerja;
- c) tingkat pendapatan;
- d) tingkat pangan, sandang, perumahan;
- e) tingkat pendidikan dan kesehatan;
- f) peran serta;
- g) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan
- h) kesamaan dalam hukum.

Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan

meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward et al. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (the inner-experience), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan demand terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Zeitlin et al., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan social merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat

subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias et al., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan.

Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan).

Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (standard of living) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (well-being) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat

kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina et al., 2004).

Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (quality of life) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) biodiversity, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, b) diversity, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan (Sharpe, 2004).

#### **2.1.4. Teori Produksi**

Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, managerial skill (Soeharno, 2009:). Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk (form utility), memindahkan tempat (place utility), dan menyimpan (store utility). Teori produksi pada prinsipnya menjelaskan hubungan antara jumlah output maksimum yang bisa diproduksi dengan menggunakan sejumlah input-output yang tersedia pada tingkat teknik tertentu. Yang dimaksud dengan input adalah faktor produksi.

Sistem produksi adalah merupakan keterkaitan komponen satu (input) dengan komponen lain (output) dan juga menyangkut "prosesnya" terjadi interaksi satu dengan lainnya untuk mencapai satu tujuan. Salah satu lingkungan ekonomi adalah sistem produksi. Komponen dalam system produksi adalah input, proses dan output.

Komponen input meliputi: tanah, tenaga kerja, modal (capital), manajemen, energi, informasi, dan sebagainya yang ikut berperan menjadi komponen atau bahan baku dari suatu produk. Komponen output adalah barang dan/atau jasa. Komponen proses dalam mentransformasi nilai tambah dari input ke output adalah pengendalian input, pengendalian proses itu sendiri, dan

pengendalian teknologi sebagai upaya umpan balik dari output ke input. Upaya umpan balik ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas output yang diinginkan sesuai dengan harapan (expectation) produsen.

Faktor produksi adalah segala sesuatu yang ikut dalam proses produksi untuk meningkatkan utility suatu barang. Faktor produksi terdiri atas:

- a. Land (natural resources) = R
- b. Labour (tenaga kerja) = L
- c. Capital (modal) = K
- d. Skill (keahlian/kewirausahaan) = S

Hubungan antara faktor produksi yang digunakan dengan hasil produksi yang dicapai disebut fungsi produksi yang dinyatakan dalam rumus:  $Q = f(R, L, K, S)$ . Artinya besar kecil output sangat tergantung pada besar kecilnya input yang digunakan.

#### Fungsi Produksi

Fungsi produksi didefinisikan sebagai fungsi yang menunjukkan hubungan fisik antara output dengan input dalam suatu proses produksi (Setiawan dan Dwi Endah Kusriani, 2010: 40). Secara symbol matematika, fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y &= f(x), \text{ apabila inputnya } (x) \text{ hanya satu} \\ Y &= f(X_1, X_2, X_3, X_p), \text{ apabila terdapat } p \text{ buah apabila} \\ &= \text{terdapat } p \text{ buah input } (X_1, X_2, X_p) \end{aligned}$$

Keterangan

$$\begin{aligned} Y &= \text{output} \\ X_1 &= X_1 \text{ (sumberdaya manusia)} \\ X_2 &= X_2 \text{ (tenaga kerja)} \\ X_3 &= X_3 \text{ (Modal)} \end{aligned}$$

### 2.1.5. Teori Distribusi

Dalam kaidah ekonomi, teori distribusi adalah upaya sistematis untuk menjelaskan pembagian pendapatan nasional antara pemilik faktor-faktor produksi lahan, tenaga kerja, dan modal. Secara tradisional, para ekonom telah mempelajari bagaimana biaya faktor dan ukuran pengembalian dari sewa mereka, upah, dan keuntungan adalah tetap (Kenneth E. Boulding, Encyclopedia Britannica).

Distribusi adalah salah satu aspek dari perantara pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (manufacturer) ke pengecer (retailer). Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan (dan biasanya juga sekaligus dijual) ke suatu distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (channel of distribution) yang akan digunakan dalam rangka usaha distribusi barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Mengingat bahwa penggunaan istilah saluran distribusi kadang-kadang disebut sebagai saluran pemasaran atau saluran perdagangan, maka definisi atau arti dari saluran distribusi/saluran perdagangan sering diartikan diartikan dalam pengertian sempit dan luas tergantung dari kacamata penulis itu menilainya.

Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi memiliki peranan penting bagi produsen, sebab kegiatan tersebut mampu menyalurkan barang yang dihasilkan produsen kepada masyarakat. Apabila barang atau jasa tidak disalurkan kepada konsumen maka hasil produksi tersebut hanya akan menumpuk di gudang saja sehingga produsen akan mengalami kerugian. Barang atau jasa

akan berguna jika sudah berada di tangan konsumen. Oleh karena itu, produsen berusaha menyalurkan barang atau jasa tersebut kepada konsumen.

Kegiatan distribusi akan berjalan lancar jika ditunjang oleh saluran distribusi yang tepat. Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga atau badan yang memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Lembaga-lembaga atau badan tersebut antara lain pedagang, distributor, agen, makelar, pengecer dan lain-lain. Beberapa pengertian Saluran Distribusi antara lain sebagai berikut:

**Menurut David A. Revzan**, saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Pengertian Distribusi yang dikemukakan tersebut masih bersifat sempit karena istilah barang sering diartikan sebagai suatu bentuk fisik, sehingga akibatnya lebih cenderung menggambarkan pemindahan jasa-jasa atau kombinasi antara barang dan jasa.

**Menurut The American Marketing Association**, saluran distribusi merupakan suatu struktur unik organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang besar dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk atau jasa dipasarkan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi yang pertama. Dengan memasukkan istilah struktur menjadikan definisi ini memiliki tambahan arti yang bersifat statis pada saluran dan tidak dapat membantu untuk mengetahui tentang hubungan-hubungan yang ada antara masing-masing lembaga.

**Menurut C. Glenn Walter**, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan pasar tertentu.

**Menurut Philip Kotler**, saluran distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi adalah suatu organisasi atau himpunan

perusahaan yang saling berkaitan untuk menyalurkan barang hingga sampai kepada konsumen. Sedangkan strategi distribusi harus ditetapkan sedini mungkin. Bahkan sebelum produk siap untuk dipasarkan, pendistribusian harus menetapkan metode dan rute yang akan digunakan untuk mendistribusikannya agar produk yang dihasilkan dapat mencapai pasar.

Saluran distribusi pemasaran dalam manajemen pemasaran adalah serangkaian peranan dari strategi pemasaran untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, sesuai dengan tingkat permintaan dan penawaran pasar dalam memperoleh keuntungan dan manfaat sesuai dengan keberadaan suatu pasar yang berjalan berdasarkan mekanisme aktivitas pemasaran. Saluran distribusi dalam suatu perusahaan yang mempunyai fungsi pemasaran biasanya digambarkan sebagai bentuk penyaluran suatu produk dari perusahaan ke konsumen, dari perusahaan ke dealer ke konsumen, dari perusahaan ke dealer, ke grosir dan ke konsumen. Bentuk-bentuk penyaluran ini merupakan bagian dari fungsi pemasaran untuk sampai ke konsumen.

### **Fungsi Saluran Distribusi**

Secara umum, fungsi saluran distribusi ada tiga, yakni berkaitan dengan waktu penyerahan, biaya serta kebutuhan akan tempat. Semuanya akan memberikan nilai tambah bagi sebuah produk. Produsen akan memperoleh beberapa keuntungan dengan menggunakan perantara. Keuntungan yang didapat menurut Kotler dan Keller (2012) adalah

- a. banyak produsen tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung;
- b. para produsen yang memang mendirikan salurannya sendiri sering dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan meningkatkan investasinya dalam bisnis utamanya;
- c. dalam beberapa kasus, pemasaran langsung sama sekali tidak dapat dilakukan.

Menurut Kotler (1994) saluran pemasaran memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. information, yaitu mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran.
- b. promotion, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan.
- c. negotiation, yaitu mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain, sehingga memungkinkan perpindahan hak pemilikan.
- d. ordering, yaitu pihak distributor memesan barang kepada perusahaan.
- e. payment, yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.
- f. title, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi/orang lain.
- g. physical possession, yaitu mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir.
- h. financing, yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biayabiaya dalam pekerjaan saluran distribusi.
- i. risk taking, yaitu menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi.

Menurut Saladin (1994) saluran pemasaran memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penelitian (research) yaitu mengumpulkan informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran.
- b. promosi (promotional) yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasif mengenai penawaran.
- c. kontak (contact) yaitu mencari dan menjalin hubungan dengan calon pembeli.
- d. penyesuaian (matching), yaitu mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan pembeli termasuk kegiatan seperti pengelolaan, penilaian, perakitan dan pengemasan.
- e. negosiasi (negotiation) yaitu usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran, sehingga pemindahan hak kepemilikan bisa dilaksanakan.

- f. distribusi fisik (physical distribution) yaitu transportasi dan penyimpanan barang.
- g. pembiayaan (financing) yaitu permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut.
- h. pengambilan resiko (risk taking) yaitu perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran itu.

#### **2.1.6. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development)**

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pada dasarnya Sustainable development merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Budihardjo, 2010).

Sustainable development dalam aktivitasnya memanfaatkan seluruh sumberdaya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumber daya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumberdaya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang (Fauzi, 2004). Dalam kaitan ini, eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumberdaya alam untuk pembangunan, harus seimbang dengan hasil produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta.

Menurut Permana (1996) dalam (Fauzi, 2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi.

Haris (2000) dalam (Fauzi, 2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan adalah sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial adalah keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Strategi dan Implementasi menggapai Sustainable Development Goals di Indonesia. Pada tahun 2000-2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) memiliki program pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) kemudian setelah berakhirnya program MDGs dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah disahkan pada akhir September 2015. Program pembangunan SDGs ini ingin dicapai sampai tahun 2030 (Subandi,2017)

Di pilihnya SDGs sebagai pengganti MDGs karena daya dukung alam terhadap kehidupan manusia semakin menurun sehingga perlu penyelamatan (Rahardian, 2016). Penurunan daya dukung alam itu seperti jumlah penduduk dunia yang terus meningkat, akibatnya akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan pemanfaatan SDA ini yang dkuatirkan akan merusak lebih jauh lautan dan daratan sebagai sumber nutrisi manusia. Kebutuhan manusia akan bahan pangan, energi dan kebutuhan lainnya yang berasal dari hutan terus meningkat. Kehidupan penduduk lokal, terutama yang berada di sekitar pantai dan hutan, terancam oleh bahaya banjir dan kekeringan. Karena itu, muncul kesadaran baru diantara negaranegara di dunia bahwa pola produksi dan konsumsi yang selama ini terjadi, dilihat dari sisi lingkungan, tidak berkelanjutan.

Indonesia salah satu negara yang ikut sertadalam mengimplementasikan program SDGs tersebut. Pemerintah akan segera meluncurkan perpres TPB/SDGs melalui integrasi 94 dari 169 target TPB/SDGs ke dalam RPJMN 2015-2019 dan penerbitan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia melalui Media Briefing yang dilaksanakan awal Agustus tahun 2017 ini. Dalam hal ini pemerintah membuktikan komitmen dan keseriusannya pada Tujuan SDGs (Kementrierian PPN/ Bappenas, 2017).

Menurut (Ishartono & Raharjo, 2016) SDGs memiliki 17 tujuan Global (Global Goals) yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan artinya tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan artinya tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan artinya menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas artinya menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender artinya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi artinya menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau artinya menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak artinya mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur artinya membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan artinya mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas artinya membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Bertanggung jawab terhadap Konsumsi dan Produksi artinya menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim artinya bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut artinya melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat artinya melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian artinya meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan artinya memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki tujuh belas arah pembangunan yang mereka tetapkan dan terdapat empat tujuan utama SDGs ini (Brodjonegoro, 2017). Pertama, mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, menyeluruh dan layak untuk semua masyarakat. Keempat, membangun infratraktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.

Dalam tujuan tersebut tentu sangat sesuai dengan keadaan Kota Tangerang dimana kota ini didominasi oleh industri dan jasa yang sangat perlu dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tujuan pembangunan ini melibatkan empat Stakholders (Subandi, 2017):

**1) Pemerintah dan Parlemen.**

Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs

dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017 menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya. Pelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Ia juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda MDGs di Indonesia.

Peran penting parlemen yaitu dalam hal membangun kemitraan internasional, sangat berperan dalam mendorong terlaksana dan tercapainya tujuan-tujuan SDGs. Pada 6 sampai 7 September 2017, 285 delegasi dari empat puluh tujuh negara telah melaksanakan World Parliamentary Forum (WTF) On Sustainable Development. Pertemuan yang menghasilkan tujuh belas poin kesepakatan itu disebut dengan Bali Declaration. Ini merupakan catatan sejarah baru bagi Indonesia dan parlemen dunia mengingat pertemuan pertama seluruh delegasi dalam membahas progres SDGs. Lima poin pertama yang ada dalam tujuh belas poin kesepakatan tersebut terkait dengan upaya penguatan parlemen untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan 2030, sedangkan dua poin terakhir terkait dengan peningkatan kerja sama antarlembaga dunia dalam mencapai tujuan SDGs.

Deklarasi Bali menekankan perlunya kerja sama lebih pemerintah dengan parlemen dalam proses implementasi SDGs. Dalam konteks ini, DPR memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk betul-betul melaksanakan SDGs. Pertemuan itu juga mencoba memperkuat fungsi parlemen dalam hal evaluasi dan monitoring. Pengawasan parlemen menjadi penting agar SDGs yang diakselerasi pemerintah bisa mencapai indikator-indikator yang telah disepakati. Di Indonesia, penguatan parlemen sebagai lembaga pengawas seiring dengan tugas dan fungsi pokok DPR RI yang tertuang dalam UU MD3.

**2) Akademisi dan Pakar.**

Akademisi dapat menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan indikator SDGs. Salah satunya yaitu dengan meninjau RPJMN 2015-2019, yang sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Dalam tinjauan tersebut, akademisi dan para pakar dapat membantu mengidentifikasi masalah dan kendala yang dapat menghambat pelaksanaan RPJMN, sekaligus memberi alternatif solusi agar sasaran dan target dapat tercapai, juga dapat mendukung pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain di daerah dalam pelaksanaan SDGs. Selain itu, akademisi dan para pakar juga dapat membantu menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, yang menjadi pedoman pelaksanaan SDGs di daerah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya akademisi dan pakar bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain juga harus mengambil peran dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs di pusat dan di daerah.

**3) Filantropi dan Bisnis.**

Filantropi dan pebisnis sangat diperlukan kontribusinya karena keberhasilan SDGs akan tergantung pada kemitraan global yang inklusif, keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat sipil, serta cara-cara inovatif untuk mobilisasi sumber daya keuangan dan teknis. Di Indonesia sudah dibentuk Forum Komunikasi Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs yang diberi nama FBI 4 SDGs. FBI 4 SDGs dibentuk pada bulan

Maret 2016 dan sampai sekarang forum ini sudah berhasil melibatkan sepuluh organisasi dan asosiasi di dunia filantropi dan bisnis. Keistimewaan lembaga filantropi adalah kemampuannya mengambil risiko yang besar dan menetaskan proyek-proyek baru yang menunjukkan keberpihakan kepada isu atau masyarakat terpinggirkan. Lembaga Filantropi memberikan perhatian dan dukungan yang lebih strategis dan efektif dengan melibatkan anak muda dan penggunaan teknologi informasi.

#### **4) Masyarakat Sipil dan Media**

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dalam tujuan pembangunan SDGs adalah untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang SDGs, membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasi. Melihat dari tujuan SDGs yang terbilang penting bagi semua negara, tentunya harus ada publikasi yang kuat dari salah satu pihak yang memiliki peran sebagai media dari pemerintah kepada publiknya. Media massa merupakan perantara dan publikasi berupa informasi-informasi mengenai SDGs seperti perkembangan, peningkatan, dan program atau agenda SDGs itu sendiri dan masih banyak lagi tugas-tugas yang dilakukan oleh media. Dengan adanya media massa ini, akan lebih mudah bagi masyarakat publik untuk mengetahui informasi secara detail mengenai SDGs dalam mengimplementasikan dan merealisasikan visi misi dari SDGs tersebut.

## 2.2. Pendekatan

### 2.2.1. Statistik

Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan nonparametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Berikut penjelasan mengenai statistic parametrik dan non parametrik:

- 1) Statistika parametrik adalah bagian statistika yang parameter poplasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data berkala interval/rasio, syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal atau normalitas dan syarat memiliki varian yang homogen atau homogenitas, model regresi linear, dan sebagainya. Dalam statistika parametrik indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan.
- 2) Statistika non-parametrik adalah bagian statistika yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala interval/ rasio syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas dan syarat memiliki varian yang homogen atau homogenitas, model regresi linier, dan lain-lain. Dalam statistika non parametrik indikator-indicator sisi lain dari parameter ukuran objek yang diteliti.

Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik (data sampel) tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Dalam statistik hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik (data yang diperoleh dari smapel). Sebagai contoh nilai suatu pelajaran 1000 mahasiswa rata-ratanya 7,5. Selanjutnya misalnya, dari 1000 orang itu diambil sampel 50 orang, dan nilai rata-rata dari sampel 50 mahasiswa itu 7,5. Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara parameter (data populasi) dan statistik (data sampel). Hanya dalam kenyataannya nilai parameter jarang diketahui. Statistik nonparametrik tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi.

Penggunaan statistik parametrik dan nonparametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis. Statistik parametrik memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu test mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang akan diuji harus homogen, dalam regresi harus terpenuhi asumsi linieritas. Statistik non parametrik sering disebut “distribution free” (bebas distribusi). Statistik parametrik mempunyai kekuatan yang lebih daripada statistik non parametrik, bila asumsi yang melandasi dapat terpenuhi. Seperti dinyatakan oleh Emory (1985) bahwa “The parametric test are more powerful are generally the tests of choice if their use assumptions are reasonably met”. Selanjutnya Phophon (1973) menyatakan “... parametric procedure are often markedly more powerful than their nonparametric counterparts”.

Penggunaan kedua statistik tersebut juga tergantung pada jenis data yang dianalisis. Statistik parametrik kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik nonparametrik kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal, ordinal. Jadi untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan.

### **2.2.2. Studi Literatur**

Studi Literatur adalah cara untuk membantu mengurai persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya, studi ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Sumber-sumber yang ditelitipun lebih banyak didominasi oleh regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat sebagai acuan.

Beberapa yang umum dan harus dirujuk adalah regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri terkait, sampai ke pedoman pelaksanaannya, termasuk peraturan daerah atau kajian sejenis di provinsi lainnya, sebab regulasi juga merupakan produk yang didalamnya terdapat

komponen akademik. Untuk memperkaya wawasan, selain regulasi, tentu penyedia jasa juga merujuk kepada beberapa jurnal penelitian.

Studi kepustakaan memuat uraian sistematis tentang regulasi dan atau kajian literatur sebelumnya yang ada hubungannya dengan kajian atau fokus penelitian yang dilakukan dan diusahakan untuk menunjukkan kondisi mutakhir dari fenomena yang ada. Secara umum studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bertujuan untuk:

- menemukan suatu masalah untuk dikaji;
- mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan dikaji;
- mengkaji beberapa teori dasar (dalam hal ini adalah regulasi) yang relevan dengan masalah yang akan dikaji. Untuk membuat uraian teoritik dan empirik yang berkaitan dengan faktor, indikator, variable dan parameter penelitian yang tercermin di dalam masalah-masalah yang ingin dipecahkan;
- memperdalam pengetahuan tentang masalah dan bidang yang akan dikaji;
- menganalisa hasil-hasil kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan kajian yang akan dilakukan;
- mendapat informasi tentang aspek-aspek mana dari suatu masalah yang sudah pernah dikaji untuk lebih melengkapi;

### **Jenis penelitian**

Jenis kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kepustakaan atau library research, yakni kajian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau kajian yang dengan objek kajian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk merumuskan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada kajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

### **Teknik Analisa Data**

Analisis isi (Content Analysis) adalah kajian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media komunikasi (cetak, elektronik, dll), sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya

untuk memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya dan kepatuhan terhadap kebijakan.

### **2.2.3. Kerangka Kerja Logis**

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan ringkasan proyek/program yang menunjukkan tingkatan tujuan proyek/program serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja. Matrik KKL sebaiknya selalu diperbaiki sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perkembangan perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Kerangka kerja yang merupakan struktur pendukung untuk membangun sesuatu bisa diidentikkan sebagai rangka yang berdiri kokoh untuk mendukung atau menopang sesuatu yang akan dibangun

Kerangka kerja logis digunakan secara luas karena mengharuskan berpikir terorganisir, dapat menghubungkan kegiatan-investasi-hasil, dapat digunakan untuk menetapkan indikator kinerja dan mengalokasikan tanggung jawab, dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dapat juga digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dapat memperhitungkan resiko.

## **BAB 3**

# **GAMBARAN UMUM WILAYAH**

### **3.1. Kajian Empiris**

#### **A. Kondisi Geografis**

##### **Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Pembentukan wilayah administratif Kota Tangerang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Pada Pasal.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, wilayah administratif Kota Tangerang terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Benda. Seiring dengan pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka Kota Tangerang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang tersebut merupakan Kota yang berada dalam Wilayah Provinsi Banten. Untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan sehingga jumlah Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tangerang bertambah menjadi 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tangerang;
2. Kecamatan Jatiuwung;
3. Kecamatan Batuceper;
4. Kecamatan Benda;
5. Kecamatan Cipondoh;
6. Kecamatan Ciledug;
7. Kecamatan Karawaci;
8. Kecamatan Periuk;
9. Kecamatan Cibodas;

10. Kecamatan Neglasari;
11. Kecamatan Pinang;
12. Kecamatan Karang Tengah;
13. Kecamatan Larangan;

Kota Tangerang memiliki luas  $\pm 184,24$  km<sup>2</sup> (termasuk Bandara Soekarno-Hatta seluas  $\pm 19,69$  km<sup>2</sup>) atau sekitar 1,59% dari luas Provinsi Banten dan merupakan wilayah yang terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan, yang berjarak  $\pm 65$  km dari Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten dan berjarak  $\pm 27$  km dari Ibukota DKI Jakarta. Secara administratif, batas wilayah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan di Kabupaten Tangerang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di DKI Jakarta.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang.

Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Berikut ini diuraikan mengenai luas dan batas wilayah administrasi Kota Tangerang menurut kecamatan.

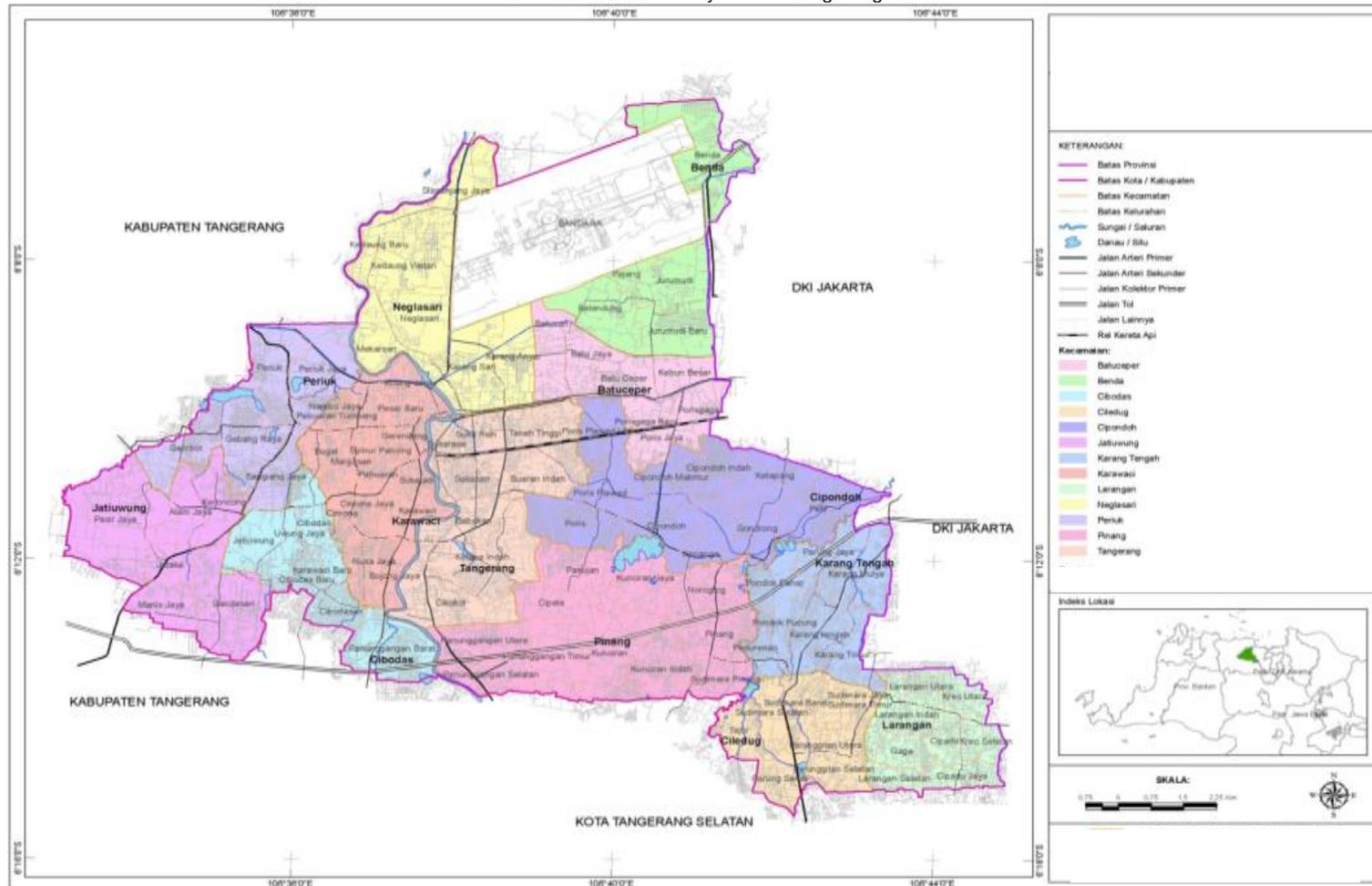
Tabel 3.1  
Luas Wilayah Kota Tangerang Menurut Kecamatan

NO.	KECAMATAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	JUMLAH KELURAHAN	BATAS WILAYAH ADMINISTRASI			
				UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	Ciledug	8,77	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Karang Tengah</li> <li>• Kec. Pinang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Larangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>
2	Larangan	9,40	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov. DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov. DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Ciledug;</li> <li>• Kec. Karang Tengah</li> </ul>
3	Karang Tengah	10,47	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Cipondoh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov. DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Ciledug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Pinang</li> </ul>
4	Cipondoh	17,91	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Batuceper;</li> <li>• Prov. DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Karang Tengah;</li> <li>• Prov. DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Pinang;</li> <li>• Kec. Karang Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Tangerang</li> </ul>
5	Pinang	21,59	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Cipondoh;</li> <li>• Kec. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Karang Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Cibodas</li> </ul>
6	Tangerang	15,79	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Neglasari</li> <li>• Kec. Batuceper</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Cipondoh;</li> <li>• Kec. Pinang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Pinang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Karawaci</li> </ul>
7	Karawaci	13,48	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Neglasari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Cibodas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Cibodas</li> </ul>
8	Cibodas	9,61	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Periuk</li> <li>• Kec. Karawaci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Pinang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Periuk;</li> <li>• Kec. Jatiuwung</li> </ul>
9	Jatiuwung	14,41	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Periuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Cibodas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>
10	Periuk	9,54	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Neglasari;</li> <li>• Kec. Karawaci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Jatiuwung;</li> <li>• Kec. Cibodas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>
11	Neglasari	16,08	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Benda;</li> <li>• Kec. Batuceper</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Karawaci;</li> <li>• Kec. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang;</li> <li>• Kec. Periuk</li> </ul>
12	Batuceper	11,58	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Benda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov. DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Cipondoh;</li> <li>• Kec. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Neglasari</li> </ul>
13	Benda*)	5,92	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tangerang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prov. DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Batuceper;</li> <li>• Kec. Neglasari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Neglasari</li> </ul>
	Jumlah	164,55*	104				

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022

Keterangan: \*) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta (19.69 km<sup>2</sup>)

Gambar 3.1  
Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang



### Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Tangerang terletak pada koordinat 106°36’–106°42’ Bujur Timur (BT) dan 6°6’-6°13’ Lintang Selatan (LS). Diantara ke-13 kecamatan, Kecamatan Larangan merupakan kecamatan terjauh dari Ibukota Tangerang (sekitar 14 km) dan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan terdekat dari Ibukota Tangerang. Jarak paling jauh antar kecamatan adalah antara Kecamatan Larangan dengan Kecamatan Benda yaitu sekitar 21 km dan Jarak paling dekat antar kecamatan adalah antara Kecamatan Cibodas dengan Kecamatan Jatiuwung yaitu sekitar 1 km.

Tabel 3.2  
Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (Km)

Kecamatan	Ciledug	Larangan	Karang Tengah	Cipondoh	Pinang	Tangerang	Karawaci	Cibodas	Jatiuwung	Periuk	Neglasari	Batuceper	Benda
Ciledug	0	3	4	5	7	11	12	15	17	15	13	15	18
Larangan	3	0	3	8	10	14	15	18	20	18	16	18	21
Karang Tengah	4	3	0	6	8	12	13	16	18	16	14	11	14
Cipondoh	5	8	6	0	4	6	9	10	12	10	8	3	6
Pinang	7	10	8	4	0	7	4	3	5	3	9	11	14
Tangerang	11	14	12	6	7	0	4	6	7	4	2	4	7
Karawaci	12	15	13	9	4	4	0	2	4	6	6	8	11
Cibodas	15	18	16	10	3	6	2	0	1	5	8	10	13
Jatiuwung	17	20	18	12	5	7	4	1	0	3	9	11	14
Periuk	15	18	16	10	3	4	6	5	3	0	4	8	11
Neglasari	13	16	14	8	9	2	6	8	9	4	0	4	7
Batuceper	15	18	11	3	11	4	8	10	11	8	4	0	3
Benda	18	21	14	6	14	7	11	13	14	11	7	3	0

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022

Letak dan kondisi geografis yang strategis ini serta ditunjang dengan aksesibilitas yang baik ke kota Jakarta dan kota-kota penting di Provinsi Banten dan Jawa Barat, yaitu dengan adanya Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak sepanjang 100 km, jalan rel kereta api double track Tangerang-Jakarta, perpanjangan koridor IV Busway Kalideres-Tangerang, serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, selain telah memicu pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa di Kota Tangerang, juga telah memicu migrasi penduduk yang masuk ke Kota Tangerang, baik sebagai tenaga kerja atau pencari kerja, maupun akibat ledakan penduduk Kota Jakarta yang menyebabkan sebagian besar penduduk Kota

Jakarta bermigrasi ke daerah sekitar Kota Jakarta termasuk Kota Tangerang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di masa mendatang. Sejalan dengan semakin meningkatnya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Kota Tangerang akan menimbulkan terjadinya ekspansi pemanfaatan lahan untuk permukiman. Pesatnya pertumbuhan permukiman akibat semakin meningkatnya migrasi penduduk ke Kota Tangerang selanjutnya akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana serta fasilitas perkotaan di Kota Tangerang, di samping berimplikasi pada turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 3.3  
Letak dan Posisi Geografi Kota Tangerang

NO.	KECAMATAN	POSISI ASTRONOMI	POSISI GEOGRAFI
1	Batuceper	6° 9'45.74"S 106°39'46.71"E	3,6 KM dari Ibukota Tangerang, 70 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 20 KM dari Ibukota DKI Jakarta
2	Benda	6° 6'44.03"S 106°41'10.53"E	13 KM dari Ibukota Tangerang, 86 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 22 KM dari Ibukota DKI Jakarta
3	Cibodas	6°12'41.51"S 106°36'30.61"E	8,5 KM dari Ibukota Tangerang, 60 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 28 KM dari Ibukota DKI Jakarta
4	Ciledug	6°13'12.15"S 106°42'48.35"E	15,4 KM dari Ibukota Tangerang, 73 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 19 KM dari Ibukota DKI Jakarta
5	Cipondoh	6°11'40.65"S 106°40'36.91"E	7,7 KM dari Ibukota Tangerang, 68,4 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 25,5 KM dari Ibukota DKI Jakarta
6	Jatiuwung	6°11'26.28"S 106°35'19.87"E	8 KM dari Ibukota Tangerang, 56,5 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 36,6 KM dari Ibukota DKI Jakarta
7	Karang Tengah	6°13'6.96"S 106°42'7.06"E	12,4 KM dari Ibukota Tangerang, 72 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 20,4 KM dari Ibukota DKI Jakarta
8	Karawaci	6°11'33.80"S 106°36'45.07"E	6,1 KM dari Ibukota Tangerang, 59,3 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 29,3 KM dari Ibukota DKI Jakarta
9	Larangan	6°13'37.46"S 106°43'53.56"E	17,7 KM dari Ibukota Tangerang, 77,6 KM dari Ibukota Provinsi Banten, dan 16,6 KM dari Ibukota DKI Jakarta
10	Neglasari	6° 9'23.32"S 106°37'47.68"E	2,7 KM dari Ibukota Tangerang 68,3 KM dari Ibukota Provinsi Banten dan 24,9 KM dari Ibukota DKI Jakarta
11	Periuk	6°10'14.11"S 106°35'45.07"E	5,8 KM dari Ibukota Tangerang 59,1 KM dari Ibukota Provinsi Banten dan 39,2 KM dari Ibukota DKI Jakarta
12	Pinang	6°13'28.04"S 106°41'25.56"E	12,5 KM dari Ibukota Tangerang 70,2 KM dari Ibukota Provinsi Banten dan 21,5 KM dari Ibukota DKI Jakarta
13	Tangerang	6°10'19.81"S 106°37'59.29"E	1,5 KM dari Ibukota Tangerang 66,9 KM dari Ibukota Provinsi Banten dan 31,1 KM dari Ibukota DKI Jakarta

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022

### Topografi

Wilayah Kota Tangerang sebagian besar berada pada ketinggian 10-18 m di atas permukaan laut (dpl), sedangkan di bagian Utara meliputi sebagian besar Kecamatan Benda ketinggiannya rata-rata 10 mdpl, sedang di bagian selatan seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah memiliki

ketinggian 18 m dpl. Selain itu, Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3% dan sebagian kecil (yaitu di bagian Selatan wilayah Kota) kemiringan tanahnya 3-8% yang meliputi wilayah Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Panningilan Selatan, dan Kelurahan Cipadu Jaya. Kota Tangerang tidak memiliki wilayah pesisir karena tidak ada daerah yang langsung berbatasan dengan pantai. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan di Kota Tangerang cukup landai. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi pengembangan Kota Tangerang secara umum, terutama untuk pengembangan kegiatan perkotaan. Namun demikian, kondisi topografi Kota Tangerang yang cukup landai ini juga menjadi tantangan tersendiri karena hal ini menyebabkan Kota Tangerang memiliki potensi genangan dan banjir.

Tabel 3.4  
Kondisi Topografi Kota Tangerang

NO	KECAMATAN	KONDISI TOPOGRAFI	
		KEMIRINGAN LAHAN	KETINGGIAN DPL (M)
1	Batuceper	0-3%	14,0
2	Benda	0-3%	10,0
3	Cibodas	0-3%	14,0
4	Ciledug	3-8%	18,0
5	Cipondoh	0-3%	14,0
6	Jatiuwung	0-3%	14,0
7	Karang Tengah	0-3%	18,0
8	Karawaci	0-3%	14,0
9	Larangan	3-8%	18,0
10	Neglasari	0-3%	14,0
11	Periuk	0-3%	14,0
12	Pinang	0-3%	14,0
13	Tangerang	0-3%	14,0
	Kota Tangerang	0-3%	14,0

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022

## Geologi

Secara geologis, daerah Tangerang berada pada suatu tinggian struktur yang dikenal dengan sebutan Tangerang High. Tinggian ini terdiri atas batuan Tersier yang memisahkan Cekungan Jawa Barat Utara di bagian barat dengan Cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan normal, berarah utara-selatan. Di bagian timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta.

Tinggian ini terbentuk oleh batuan Tersier yang memisahkan cekungan Jawa Barat Utara di bagian Barat dengan cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan normal yang berarah Utara-Selatan. Di bagian Timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta.

Batuan yang menutupi Kota Tangerang terdiri dari endapan alluvium, endapan kipas alluvium vulkanik muda, dan satuan Tuf Banten. Deskripsi singkat mengenai jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut:

### **Satuan Batuan Tuf Banten Atas/Tuf Banten**

Satuan ini terdiri atas lapisan tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan yang berasal dari letusan Gunung Rawa Danau. Tuf tersebut menunjukkan sifat yang lebih asam (pumice) dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya. Bagian atas satuan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari lingkungan pengendapan di atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air. Satuan ini berumur Plio–Plistosen atau sekitar dua juta tahun.

### **Endapan Vulkanik Muda**

Endapan ini terdiri atas material batu pasir, batu lempung tufan, endapan lahar, dan konglomerat yang membentuk endapan kipas. Ukuran butiran berubah menjadi semakin halus (lempungan) dan menebal ke arah utara. Hal ini menunjukkan sumber material berasal dari selatan. Satuan ini terbentuk oleh material endapan vulkanik

yang berasal dari gunung api di sebelah selatan Kabupaten Tangerang, seperti Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Plistosen (20.000 – dua juta tahun). Kipas vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan melalui lembah. Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk endapan seperti kipas.

#### **Endapan Pantai dan Endapan Pematang Pantai**

Endapan batuan ini berasal dari material batuan yang terbawa oleh aliran sungai dan berumur antara 20.000 tahun hingga sekarang. Endapan tersebut tersusun oleh material lempung, pasir halus dan kasar, dan konglomerat serta mengandung cangkang moluska. Endapan alluvium tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam.

#### **Endapan Aluvium**

Endapan ini terdiri atas lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah yang berumur Kuartar dan tersebar pada daerah pedataran serta sekitar aliran sungai.

#### **Hidrologi**

Secara hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) aliran sungai yaitu sungai Cisadane, kali Angke dan kali Cirarab dengan panjang daerah yang dilalui sepanjang 32,00 Km. Sungai Cisadane membagi Kota Tangerang menjadi dua bagian, yaitu bagian Timur sungai dan bagian Barat sungai. Kecamatan yang terletak di bagian Barat Sungai Cisadane meliputi Kecamatan Jatiuwung dan sebagian Kecamatan Tangerang. Sungai Cisadane memiliki debit air 88 m<sup>3</sup> per detik dan mengalir sejauh 15 Km.

Tabel 3.5  
Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Catchment Area (ha)	Panjang (km)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Debit (m <sup>3</sup> /detik)
DAS Cisadane	106.350	15,00	100	5,35	88
DAS Cirarab	6.030	7,00	11	3,50	36
DAS Angke	7.430	10,00	12	5,50	24
Jumlah	119.810	32,00			

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022

### Daerah Aliran Sungai Cisadane

Sungai Cisadane yang membagi Kota Tangerang menjadi dua wilayah (bagian Timur sungai dan bagian Barat sungai) memiliki daya tampung aerseluas 106.350 Ha, dengan panjang 15 km dan lebar 100 m, kedalaman sungai Cisadane rata rata 5,35 m serta debit air dalam kondisi normal sekitar 88 m<sup>3</sup>/det. Bendungan Pintu 10 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari merupakan bendungan untuk mengendalikan debit air Sungai Cisadane ke arah hilir Kabupaten Tangerang dan dimanfaatkan untuk irigasi teknis. Pada DAS Cisadane yang berada di Kota Tangerang terdapat 43 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara di Kali Cisadane, dimana anak sungai yang terbesar adalah Saluran Mookervaart yang merupakan sodetan penghubung Kali Cisadane dan Kali Angke. Sungai Cisadane sangat panjang melintasi daerah administrasi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang dan akhirnya bermuara di Laut Jawa.

### Daerah Aliran Sungai Cirarab

Sungai Cirarab melintasi wilayah administrasi Kota Tangerang sekitar 7,00 km, di daerah perbatasan barat dengan Kabupaten Tangerang. Lebar Kali Cirarab sekitar 11 m dengan kedalaman rata-rata 3,50 m dan debit air dalam kondisi normal 36 m<sup>3</sup>/detik. DAS Cirarab memiliki daerah tangkapan air seluas 6.030 Ha. Hulu sungai Kali Cirarab berada di bagian Utara Kabupaten Bogor sekitar Kecamatan Rumpin. Aliran Kali Cirarab berkelok-kelok, melintasi 3 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirarab merupakan kawasan budidaya daerah terbangun. Pada DAS Cirarab yang berada di Kota Tangerang terdapat 4 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara ke Kali

Cirarab, yaitu: Kali Cangkring, Kali Sasak, Kali Keroncong, dan Kali Jatake.

### **Daerah Aliran Sungai Angke**

Sungai Angke melalui wilayah Kota Tangerang sepanjang 10,00 km dengan lebar sungai sekitar 12 m pada kawasan terbuka dan menyempit menjadi 3-4 meter pada kawasan terbangun/ perkotaan. Kedalaman rata-rata Kali Angke adalah 5,50 m, memiliki daerah tangkapan air seluas 7.430 Ha dan debit air pada kondisi normal tercatat sekitar 24 m<sup>3</sup>/det.

Sungai Angke mengalir di bagian Timur Kota Tangerang. Hulu Sungai Angke berasal dari daerah Semplak, Kabupaten Bogor. Aliran Sungai Angke melintasi 4 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Jakarta Barat, berakhir di Saluran Pembuang Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke merupakan kawasan terbangun intensitas sedang-tinggi, yaitu kegiatan permukiman dan kegiatan perkotaan. Pada DAS Angke yang berada di Kota Tangerang terdapat 7 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara ke Kali Cirarab.

Selain sungai, di Kota Tangerang juga terdapat situ/rawa sebanyak 6 (enam) buah dengan total luas 152,01 Ha dan kedalaman antara 2-3 meter. Kota Tangerang juga mempunyai 54 saluran pembuangan dengan total panjang 150,03 Km, dan 16 saluran irigasi dengan total panjang mencapai 62.488,30 Km. Nama-nama situ/danau di Kota Tangerang tersebut diantaranya adalah Situ Cipondoh, Situ Besar/Gede, Situ Cangkring, Situ Kunciran, Situ Bojong, dan Situ Bulakan. Sedangkan 3 (tiga) situ lainnya, yaitu Situ Kompeni, Situ Plawad, dan Situ Kambing sudah tidak aktif menjadi situ/danau.

Situ Cipondoh merupakan situ atau danau terbesar yang berada di Kecamatan Cipondoh dengan luas kurang lebih 126,17 Ha. Di sekitar Situ Cipondoh, terdapat bagian yang mengalami pendangkalan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan basah, sehingga perlu kontrol yang lebih ketat agar tidak beralih fungsi. Selama ini Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan

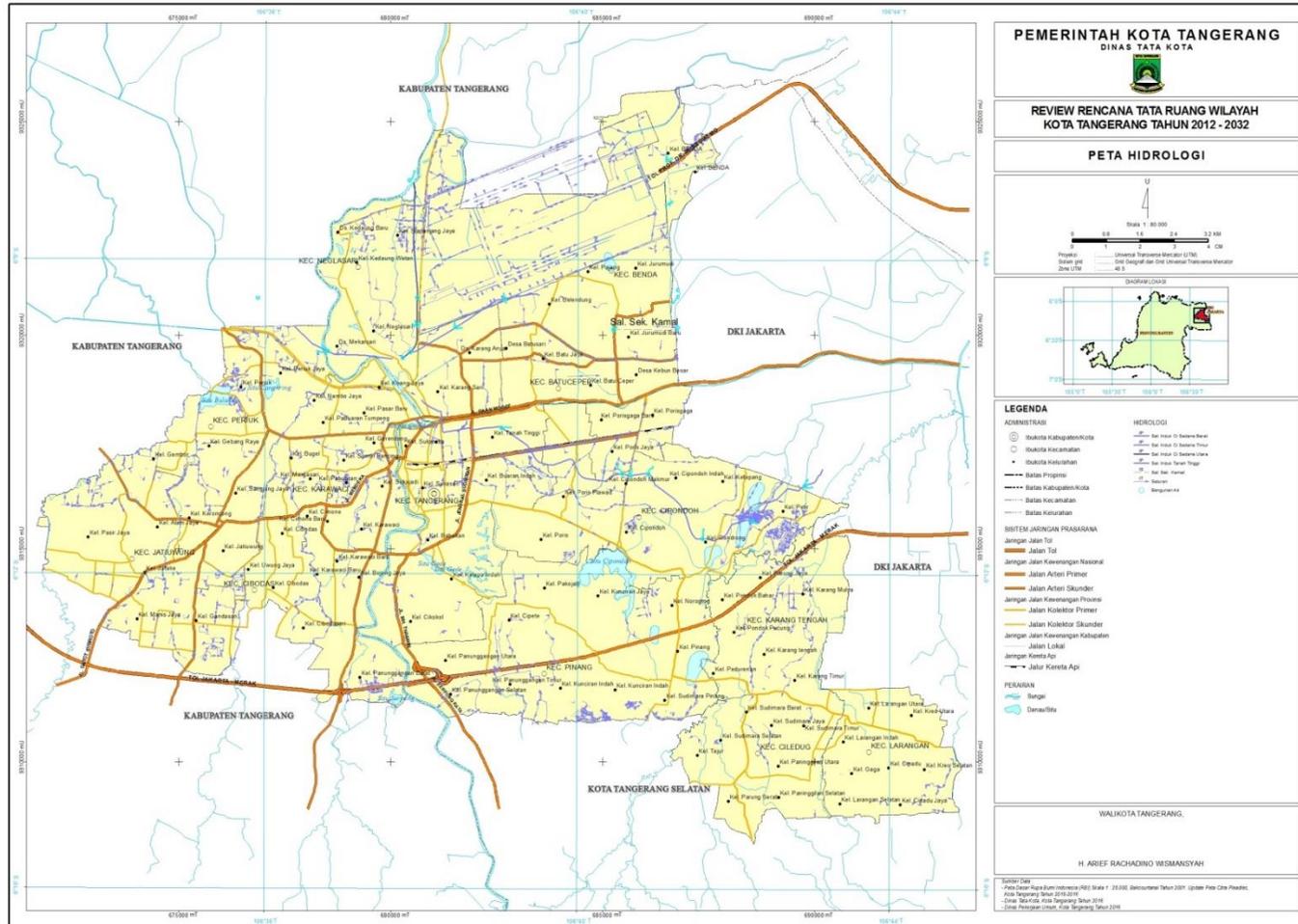
air baku dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi permukaan air Situ Cipondoh. Untuk lebih jelasnya, berikut kondisi 6 (enam) Situ/Rawa di Kota Tangerang.

Tabel 3.6  
Nama Situ/Danau di Kota Tangerang

No	Nama Situ/Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Kewenangan	Digunakan oleh masyarakat
1	Cipondoh	Kec. Cipondoh Kec. Pinang	126,17	3,00	Pusat/ Prov. Banten	sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata
2	Besar (Gede)	Kel. Cikokol Kec. Tangerang	5,07	3,00	Pusat/ Prov. Banten	sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata
3	Cangkring	Kec. Periuk	5,17	3,00	Pusat/ Prov. Banten	sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata
4	Kunciran	Kel. Kunciran Kec. Pinang	0,40	2,50	Pusat/ Prov. Banten	sebagai danau Reservoir
5	Bojong	Kel. Kunciran Kec. Pinang	0,20	3,00	Pusat/ Prov. Banten	sebagai danau reservoir
6	Bulakan	Kec. Periuk	15,00	3,00	Pusat/ Prov. Banten	sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata
7	Kompeni	Kel. Rawa Bokor Kec. Benda	-	-	-	-
8	Plawad	Kec. Cipondoh	-	-	-	-
9	Kambing	Kec. Karang Tengah	-	-	-	-
Kota Tangerang			152,01	17,5		

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 3.2  
Peta Hidrologi Kota Tangerang



## Klimatologi

Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata yang terjadi pada Tahun 2021 sebesar 27,5°C. Rata-rata suhu tertinggi sebesar 33,9°C dan rata-rata suhu udara terendah sebesar 21,9°C. Jika dilihat perkembangan dari tahun sebelumnya, terjadi perubahan suhu rata-rata yaitu dari 27,8 °C pada Tahun 2020 menjadi 27,5°C pada Tahun 2021.

Waktu terpanas pada Tahun 2021 terjadi pada bulan Desember dengan suhu tertinggi sebesar 35,5°C. Sedangkan waktu terdingin terjadi pada bulan Juli dengan suhu terendah sebesar 19,5°C dan rata-rata suhu sebesar 24,7°C. Berikut duraikan kondisi temperatur Kota Tangerang berdasarkan bulan pada Tahun 2021.

Tabel 3.7  
Temperatur Udara di Kota Tangerang

Bulan	Temperatur Maximum (°C)	Temperatur Minimum (°C)	Temperatur Rata-rata (°C)
Januari	33,2	22,2	26,5
Februari	34,2	21,8	26,7
Maret	33,6	20,5	27,5
April	33,4	22,2	27,7
Mei	33,5	23,2	28,2
Juni	33,5	21,4	27,5
Juli	33,5	19,5	27,4
Agustus	33,6	21,3	27,6
September	33,8	23,0	28,1
Oktober	34,4	22,4	28,2
November	34,5	22,8	27,7
Desember	35,5	22,1	27,4
Tahun 2021	33,9	21,9	27,5
Tahun 2020	32,6	24,7	27,8
Tahun 2019	32,3	24,9	27,9
Tahun 2018	32,6	24,3	27,9

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022

Kondisi iklim Kota Tangerang juga dapat dilihat dari banyaknya hari hujan, curah hujan, dan kelembapan udara pada kurun waktu tertentu. Pada Tahun 2021, Kota Tangerang memiliki rata-rata banyaknya hari hujan adalah 13,0 hari dalam sebulan. Hujan terbanyak pada Tahun 2021 terjadi pada bulan Februari sebanyak 23 hari dan bulan yang mengalami hujan paling sedikit adalah bulan Mei sebanyak 8 hari

dalam satu bulan. Rata-rata curah hujan di Kota Tangerang pada Tahun 2021 adalah 170,7 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 446,3 mm sedangkan curah hujan terendah adalah bulan November sebesar 39,5 mm. Kota Tangerang memiliki rata-rata kelembaban pada Tahun 2021 sebesar 78,8% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 84,0% dan kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus dan November sebesar 76,2%. Berikut ini diuraikan rata-rata curah hujan dan kelembaban udara di Kota Tangerang pada Tahun 2021.

Tabel 3.8  
Rata-rata Curah Hujan dan Kelembaban Udara  
di Kota Tangerang

Bulan	Banyak Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Kelembaban Udara (%)
Januari	22	350,7	83,3
Februari	23	446,3	84,0
Maret	16	201,3	79,5
April	12	152,4	78,2
Mei	8	151,7	78,6
Juni	10	49,0	81,4
Juli	10	41,7	76,6
Agustus	9	130,0	76,2
September	10	54,3	75,5
Oktober	9	110,0	75,4
November	13	39,5	76,2
Desember	14	321,9	80,5
Tahun 2021	13,0	170,7	78,8
Tahun 2020	14,8	170,4	80,3
Tahun 2019	16,2	221,9	81,3
Tahun 2018	11,0	147,5	77,2

Keterangan :

- Curah hujan tidak dalam rata-rata tetapi total dalam satu bulan

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2022

## Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Tangerang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.895.486 jiwa (Hasil Sensus Penduduk 2020) dan meningkat menjadi 1.911.914 jiwa pada Tahun 2021 dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,87%. Pertumbuhan penduduk ini salah satunya dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Tangerang, karena Kota Tangerang merupakan daerah yang sangat strategis sebagai kota jasa, perdagangan dan permukiman. Kota Tangerang juga berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta sehingga kebijakan pembatasan penduduk di Jakarta berdampak terhadap Kota Tangerang sebagai alternatif tujuan migrasi. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas yang memadai. Oleh karena itu, penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berikut ini diuraikan jumlah penduduk Kota Tangerang Tahun 2020-2021.

Tabel 3.9  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tangerang  
Tahun 2020-2021

No.	Kelompok Umur	2010	2020	2021
1	0-4	173.157	167.518	166.179
2	5-9	159.428	158.198	157.782
3	10-14	141.176	151.229	150.883
4	15-19	155.838	146.774	144.876
5	20-24	188.168	149.136	147.691
6	25-29	215.582	160.202	159.550
7	30-34	192.769	162.526	162.680
8	35-39	159.323	167.823	168.977
9	40-44	127.995	157.153	158.936
10	45-49	98.132	134.383	137.348
11	50-54	74.388	108.857	112.107
12	55-59	48.551	88.475	91.919
13	60-64	26.668	63.947	67.332
14	65-69	16.538	44.820	47.905
15	70-75	10.910	17.992	20.674
16	75+	9.978	16.453	17.075
	Total	1.798.601	1.895.486	1.911.914

Sumber: BPS Kota Tangerang, Tahun 2022 (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022)

Keterangan:

Tahun 2010 = Hasil Sensus Penduduk 2010

Tahun 2020 = Hasil Sensus Penduduk 2020

## B. Kondisi Perekonomian

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDB maupun PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari PDRB antara lain adalah sebagai berikut:

1. PDRB harga berlaku (nominal) (PDRB ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) (PDRB ADHK) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha**

Klasifikasi PDB/PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDB/PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. PDB/PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha pada tahun dasar 2010. PDB/PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (8) transportasi dan pergudangan; (9) penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi dan komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) real estate; (13) jasa perusahaan; (14) administrasi pemerintah, pertanahan dan jaminan sosial wajib;

(15) jasa pendidikan; (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (17) jasa lainnya.

Terdapat 2 (dua) jenis penghitungan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni Tahun 2010. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dengan memperhitungkan tingkat inflasi.

Nilai PDRB ADHB Kota Tangerang dalam periode Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 149,005 Triliun pada Tahun 2017 menjadi Rp. 150,330 Triliun pada Tahun 2021. Nilai PDRB ADHK Kota Tangerang dalam periode Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 101,274 Triliun pada Tahun 2017 menjadi Rp. 106,705 Triliun pada Tahun 2021.

Berikut ini diuraikan perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Tangerang Tahun 2017-2021.

Tabel 3.10  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)  
 Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

KODE	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.112.469.54	2.343.585.78	2.562.820.60	2.684.166.80	2.834.994.10
B.	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Industri Pengolahan	44.990.455.22	47.487.779.79	49.970.293.80	48.780.063.50	51.637.104.20
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	285.148.90	305.496.43	318.829.40	312.379.20	333.151.10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	88.347.56	94.457.82	100.590.60	110.943.60	125.411.40
F.	Konstruksi	10.189.117.88	11.129.353.99	12.193.194.00	12.293.000.80	13.880.327.50
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.899.153.76	16.293.271.74	17.990.117.50	18.264.366.90	18.996.257.90
H.	Transportasi dan Pergudangan	46.538.706.53	51.096.359.42	53.209.280.10	23.144.616.70	22.283.049.60
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.054.213.29	2.216.176.32	2.379.327.50	2.312.770.50	2.407.337.60
J.	Informasi dan Komunikasi	6.718.527.38	7.055.592.14	7.490.861.50	8.110.545.80	8.608.829.20
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.863.495.58	4.270.048.32	4.446.650.90	4.753.100.00	5.285.771.60
L.	Real Estat	7.685.860.64	8.456.828.40	9.289.094.70	10.282.869.40	10.940.967.80
M.N.	Jasa Perusahaan	1.486.404.92	1.624.076.95	1.815.763.30	1.845.281.70	1.840.980.30
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.716.396.22	1.844.938.64	2.013.512.20	2.113.610.10	2.179.006.50
P.	Jasa Pendidikan	3.157.713.02	3.579.575.59	3.996.897.20	4.372.977.60	4.392.507.60
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.204.057.70	1.339.727.45	1.498.789.10	1.823.880.90	2.040.496.90
R.S.T.U.	Jasa Lainnya	2.015.476.66	2.222.359.57	2.456.424.00	2.457.117.40	2.544.099.10
	<b>PDRB ADHB</b>	<b>149.005.544.80</b>	<b>161.359.628.35</b>	<b>171.732.446.40</b>	<b>143.661.690.90</b>	<b>150.330.292.40</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang Tahun 2022 (Publikasi Februari 2022)

Keterangan :

Tahun 2019 = Angka Revisi

Tahun 2020 = Angka Sementara

Tahun 2021 = Angka Sangat Sementara

Tabel 3.11  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang  
 Tahun 2017–2021 (Juta Rupiah)

KODE	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.473.068.23	1.586.326.31	1.694.004.10	1.744.673.70	1.745.997.50
B.	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Industri Pengolahan	37.352.392.58	38.351.714.78	39.566.347.70	37.862.197.00	39.132.952.20
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	172.553.59	178.654.99	185.037.20	182.123.70	194.010.50
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	81.451.60	85.882.57	91.121.40	99.850.80	111.423.50
F.	Konstruksi	7.309.901.70	7.696.595.50	8.219.964.00	8.207.634.00	8.929.890.20
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.938.042.75	13.691.609.49	14.679.063.30	14.503.429.10	14.833.499.60
H.	Transportasi dan Pergudangan	16.553.892.78	17.495.765.87	16.724.276.00	9.095.643.20	9.196.007.10
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.527.638.21	1.637.995.38	1.746.490.80	1.679.758.60	1.739.776.80
J.	Informasi dan Komunikasi	7.912.814.61	8.469.876.76	9.260.963.20	10.141.680.90	10.758.295.00
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.810.664.73	3.015.473.78	3.094.442.30	3.300.814.20	3.525.303.50
L.	Real Estat	6.542.003.36	7.011.719.20	7.691.166.60	8.192.114.00	8.548.470.90
M.N.	Jasa Perusahaan	1.044.917.95	1.114.613.98	1.204.897.70	1.189.595.50	1.174.606.60
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.112.187.14	1.174.803.28	1.252.340.30	1.247.957.10	1.247.280.30
P.	Jasa Pendidikan	2.179.683.63	2.342.070.06	2.518.896.30	2.681.365.20	2.655.892.20
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	916.189.07	977.207.26	1.056.361.10	1.245.025.50	1.365.046.00
R.S.T.U.	Jasa Lainnya	1.347.277.47	1.453.308.21	1.571.026.20	1.524.366.70	1.546.774.90
	<b>PDRB ADHK</b>	<b>101.274.679.40</b>	<b>106.283.617.42</b>	<b>110.556.398.20</b>	<b>102.898.229.20</b>	<b>106.705.226.80</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2022 (Publikasi Februari 2022)

Keterangan :

Tahun 2019 = Angka Revisi

Tahun 2020 = Angka Sementara

Tahun 2021 = Angka Sangat Sementara

## **Struktur Perekonomian**

Struktur ekonomi merujuk pada dasar sebuah perekonomian yang dikaitkan dengan sektor (lapangan usaha) pembentuknya, atau dapat pula diartikan struktur ekonomi sebagai komposisi peranan masing-masing lapangan usaha dalam perekonomian.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Selama periode 2017-2021, struktur perekonomian Kota Tangerang telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang. Pada tahun 2021, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 54,23 persen yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 61,30 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder memberikan sumbangan masing-masing sebesar 1,89 persen dan 43,89 persen.

Kelompok lapangan usaha primer mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2017 yang sumbangannya sebesar 1,42 persen, begitupun kelompok lapangan usaha sekunder yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 dimana tahun 2017 memberikan sumbangan 36,57 persen.

Terdapat tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kota Tangerang selama Tahun 2017-2021, yaitu Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dimana share dari Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing adalah 34,35 persen, 14,82 persen, dan 12,64 persen.

Jika share lapangan usaha Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020, ternyata lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan masih menunjukkan penurunan share yaitu 16,11 persen menjadi 14,82 persen di tahun 2021. Ini disebabkan karena sektor transportasi dan pergudangan masih belum sepenuhnya pulih walaupun beberapa pelonggaran pembatasan sudah mulai diberlakukan. Sedangkan sebagian besar lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan share walaupun sedikit, terutama pada lapangan usaha konstruksi, informasi dan komunikasi, real estate dan jasa Kesehatan dan kegiatan sosial.

Karakteristik perekonomian Kota Tangerang dapat dilihat dari struktur perekonomian yang menggambarkan tentang keunggulan masing-masing sektor, dimana keunggulan ini dihitung berdasarkan kontribusi setiap sektor terhadap total PDRB. Kontribusi yang paling besar dapat dikategorikan sebagai sektor basis dan sektor unggulan daerah. Berikut ini diuraikan mengenai kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB Tahun 2017-2021.

Tabel 3.12  
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha  
Kota Tangerang Tahun 2017-2021 (Persen)

KODE	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42	1,45	1,49	1,87	1,89
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	30,19	29,43	29,10	33,95	34,35
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,19	0,19	0,22	0,22
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08
F.	Konstruksi	6,84	6,90	7,10	8,56	9,23
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,00	10,10	10,48	12,71	12,64
H.	Transportasi dan Pergudangan	31,23	31,67	30,98	16,11	14,82
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,38	1,37	1,39	1,61	1,60
J.	Informasi dan Komunikasi	4,51	4,37	4,36	5,65	5,73
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,59	2,65	2,59	3,31	3,52
L.	Real Estat	5,16	5,24	5,41	7,16	7,28
M,N.	Jasa Perusahaan	1,00	1,01	1,06	1,28	1,22
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,15	1,14	1,17	1,47	1,45
P.	Jasa Pendidikan	2,12	2,22	2,33	3,04	2,92
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,83	0,87	1,27	1,36
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,35	1,38	1,43	1,71	1,69
	<b>PDRB ADHB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2022 (Publikasi Februari 2022)

Keterangan :

Tahun 2019 = Angka Revisi

Tahun 2020 = Angka Sementara

Tahun 2021 = Angka Sangat Sementara

Kontribusi sektor ekonomi Kota Tangerang, yang dihitung berdasarkan sisi produksi masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Ketiga sektor ini memberikan daya ungkit yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang didominasi oleh konsumsi masyarakat sedangkan investasi dan ekspor masih perlu didorong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pada Tahun 2021, sektor Industri Pengolahan (34,35%), sektor Transportasi dan Pergudangan (14,82%), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,64%) merupakan tiga penyumbang terbesar terhadap PDRB ADHB.

## Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kinerja ekonomi suatu daerah atau negara dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung terhadap tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, tingkat investasi dan besaran ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam formulasi adalah  $Y = C + I + G + (X-M)$ . Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB ADHK. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Tahun 2017-2021 dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Perekonomian Kota Tangerang pada Tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Ini merupakan resultan dari sebagian besar sektor yang sudah menunjukkan pertumbuhan positif sebagai akibat dari sudah mulai meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas di Kota Tangerang. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2021 tumbuh sebesar 3,70 persen, sedangkan Tahun 2019 dan 2020 tumbuh sebesar 4,02 persen dan -6,93 persen.

Sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan yang berdampak terhadap meningkatnya produksi. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah yaitu sebesar 11,59 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,64 persen dan konstruksi sebesar 8,80 persen.

Sementara itu, terdapat lapangan usaha yang masih tumbuh negatif, berturut-turut adalah Jasa Perusahaan (-1,26 persen), Jasa Pendidikan (-0,95 persen) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-0,05 persen).

Ketiga sektor ini masih terdampak dari pembatasan karena pandemi Covid-19 walaupun pelonggaran terhadap pembatasan sudah mulai diberlakukan. Hal ini dapat dilihat pada sektor pendidikan dimana pembelajaran tatap muka masih belum 100 persen dilaksanakan. Aktivitas perekonomian sektor jasa juga masih terbatas, bahkan beberapa perusahaan masih belum beroperasi.

Tabel 3.13  
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen)

KODE	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,04	7,69	6,79	2,99	0,08
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	3,62	2,68	3,17	-4,31	3,36
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,95	3,54	3,57	-1,57	6,53
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,04	5,44	6,10	9,58	11,59
F.	Konstruksi	6,70	5,29	6,80	-0,15	8,80
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	5,82	7,21	-1,20	2,28
H.	Transportasi dan Pergudangan	8,67	5,69	-4,41	-45,61	1,10
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,90	7,22	6,62	-3,82	3,57
J.	Informasi dan Komunikasi	9,24	7,04	9,34	9,51	6,08
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	7,29	2,62	6,67	6,80
L.	Real Estat	8,11	7,18	9,69	6,51	4,35
M,N.	Jasa Perusahaan	7,17	6,67	8,10	-1,27	-1,26
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	5,63	6,60	-0,35	-0,05
P.	Jasa Pendidikan	7,46	7,45	7,55	6,45	-0,95
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,04	6,66	8,10	17,86	9,64
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	8,03	7,87	8,10	-2,97	1,47
	<b>PDRB ADHK</b>	<b>5,88</b>	<b>4,95</b>	<b>4,02</b>	<b>-6,93</b>	<b>3,70</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2022 (Publikasi Februari 2022)

Keterangan :

Tahun 2019 = Angka Revisi

Tahun 2020 = Angka Sementara

Tahun 2021 = Angka Sangat Sementara

Pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami perlambatan dari 5,88% pada Tahun 2017 menjadi 3,70% pada Tahun 2021. Bahkan pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terkontraksi -6,92% sebagai dampak pandemi Covid 19 dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2021, proses pemulihan ekonomi mulai terjadi. Berikut ini diuraikan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2017-2021.

Tabel 3.14  
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)  
Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia  
Tahun 2017-2021 (Persen)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Kota Tangerang	5,88	4,95	4,02	-6,93	3,70
2	Provinsi Banten	5,75	5,77	5,29	-3,38	4,44
3	Indonesia	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, 2022

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Selama periode Tahun 2017-2021, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang cenderung mengalami penurunan (terjadi perlambatan ekonomi). Pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mengalami kontraksi -6,93% yang disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang. Namun pada Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang tumbuh positif sekitar 3,70%. Kondisi ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi mulai terjadi walaupun Pandemi Covid-19 masih berlangsung sampai dengan sekarang. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional dalam periode Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa LPE Kota Tangerang dibawah atau lebih rendah dari Provinsi Banten dan nasional setiap tahunnya. Pada Tahun 2021, LPE Kota Tangerang mencapai 3,70% lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 4,44% dan lebih tinggi dari nasional yang mencapai 3,69%.

### **PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita, PDRB per kapita dirumuskan sebagai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat memberikan gambaran mengenai laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penggunaan indikator ini harus digunakan secara hati-hati karena pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, namun harus berkesinambungan, mantap dan harus disertai terjadinya perubahan sikap dan kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan ekonomi.

Pada tahun 2021, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang mencapai 78,63 juta rupiah atau senilai US\$ 5.495,09 , mengalami pertumbuhan 3,6 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 75,90 juta rupiah (US\$ 5.214,21). Ini mengindikasikan bahwa perekonomian sudah mulai menggeliat, sehingga pendapatan masyarakat naik. Ini didukung kuat oleh pertumbuhan daya beli masyarakat yang tumbuh sebesar 1,79 persen di tahun 2021.

PDRB per kapita adalah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per jiwa atau satu orang penduduk yang dihitung berdasarkan harga pada tahun penghitungan dengan mengesampingkan laju inflasi. Sedangkan PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk dengan memperhitungkan angka inflasi. Berikut ini diuraikan perkembangan PDRB per kapita Kota Tangerang.

Tabel 3.15  
PDRB per Kapita Kota Tangerang Tahun 2017-2021  
(Rp.Juta/ Jiwa/Tahun)

KODE	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHB/kapita/thn	69,63	73,84	78,05	75,90	78,63
2	PDRB ADHK/kapita/thn	47,33	48,64	50,24	54,36	55,81
3	laju pertumbuhan PDRB ADHB/kapita/thn	7,06	6,04	5,70	-2,75	3,60
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK/kapita/thn	3,60	2,77	3,31	8,19	2,67
5	PDRB ADHB/kapita/bulan	5,80	6,15	6,40	5,25	5,34
6	PDRB ADHK per Kapita per Bulan	3,94	4,05	4,12	3,76	3,79
7	laju pertumbuhan PDRB ADHB/kapita/bln	6,95	6,09	4,03	-18,01	1,80
8	laju pertumbuhan PDRB ADHK/kapita/bln	3,49	2,81	1,68	-8,78	0,88

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2022 (Publikasi Februari 2022)

Keterangan :

Tahun 2018 = Angka Revisi

Tahun 2019 = Angka Sementara

Tahun 2020 = Angka Sangat Sementara

Pada Tahun 2021 pendapatan per kapita (PDRB ADHB per kapita) mencapai sebesar Rp. 78,63 juta/jiwa/tahun. Realisasi pendapatan per kapita (PDRB ADHB per kapita) tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai Rp. 75,90 jutaJiwa/Tahun.

## Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah. Inflasi dapat digambarkan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di suatu wilayah meningkat maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Atas dasar hal tersebut maka laju inflasi kerap dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan suatu daerah atau negara. Tingginya nilai inflasi mengindikasikan semakin terbebannya perekonomian masyarakat karena terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, semakin rendah nilai inflasi atau bahkan bernilai negatif (deflasi), maka hal tersebut menunjukkan relatif stabilnya perekonomian masyarakat. Berikut ini diuraikan perkembangan tingkat inflasi Kota Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2017-2021.

Tabel 3.16  
Laju Inflasi Kota Tangerang Tahun 2017-2021  
(satuan = %)

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Inflasi	3,50	3,46	4,30	1,18	1,81

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2022

Pada Tahun 2021, inflasi mencapai 1,81%. Realisasi inflasi Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan (laju pertumbuhan) 53,39% dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai 1,18%.

Relatif stabil dan terkendalinya laju inflasi di Kota Tangerang tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana diketahui bahwa angka inflasi diperoleh dari besar kecilnya pergeseran nilai harga-harga barang kebutuhan masyarakat atau kerap disebut Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk menjaga stabilitas IHK tersebut agar dapat terkendali maka diperlukan adanya intervensi yang intensif dan berkesinambungan dari berbagai pihak,

utamanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan pasar.

## **Investasi**

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka investasi merupakan salah satu upaya bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya persaingan antar daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi dari daerahnya masing-masing. Mengingat daya tarik investasi dipengaruhi oleh banyak hal, maka tiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor mau melakukan investasi. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maka diperlukan investasi baik yang berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri/asing (PMA).

Kegiatan pengembangan penanaman modal (investasi), sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Persetujuan dan perizinan penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai pengaruh dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia. Proses persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, cepat, efisien serta tidak berbelit-belit dan birokrasi yang panjang merupakan suatu kendala yang sangat memberatkan bagi pelaku usaha. Dalam upaya pembenahan pelayanan perizinan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyediakan pelayanan perizinan secara Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara elektronik. Pelayanan izin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dilakukan secara online atau daring atau dikenal dengan Online Single Submission (OSS) dalam arti penanaman modal tidak perlu hadir secara fisik untuk mendapatkan pelayanan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, perizinan telah banyak disederhanakan serta dapat diterbitkan berdasarkan komitmen bahkan waktu yang

dibutuhkan dalam penerbitan perizinan juga telah ditentukan namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya.

Pada Tahun 2021, nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) mencapai Rp. 12,63 Triliun. Realisasi nilai realisasi investasi (PMA dan PMDN) Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan (laju pertumbuhan) sebesar 51,26% dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai Rp. 8,35 Triliun. Berikut ini diuraikan realisasi investasi di Kota Tangerang Tahun 2017-2021.

Tabel 3.17  
Realisasi Investasi di Kota Tangerang Tahun 2017-2021

TAHUN	NILAI INVESTASI (RP.JUTA)
2017	7.688.531
2018	6.790.000
2019	7.970.000
2020	8.350.000
2021	12.630.000

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang, 2022

Perkembangan realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Izin Usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan LKPM setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang. Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan Iklim Investasi di Kota Tangerang cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan pemerintah daerah, dengan upaya secara terus menerus menyederhanakan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Mall Pelayanan Publik khususnya di Kota Tangerang.

## **Kondisi Sosial Kemasyarakatan**

### **Kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian seluruh pemerintah di manapun. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa hal antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan in efficiency economic, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan satu wilayahnya berada dalam kesengsaraan karena kemiskinan yang diderita mereka. Berikut ini diuraikan tentang garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Tahun 2017-2021.

Tabel 3.18  
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Kota Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2017	508.551	105.340	4,95
2018	556.782	103.490	4,76
2019	584.318	98.370	4,43
2020	632.835	118.220	5,22
2021	655.061	134.240	5,93

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2022

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tangerang dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 cenderung fluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang dan persentase penduduk miskin di interval angka 4 persen sampai 5 persen. Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang pada Tahun 2021 mencapai 5,93% yang mengalami peningkatan dari Tahun 2020 yang mencapai 5,22%. Kondisi ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid 19 dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020.

Pemerintah Kota Tangerang melalui program kesehatan gratis, pendidikan, infrastruktur dan subsidi pangan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit guncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin. Oleh karenanya program-program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kondisi kemiskinan Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia pada periode Tahun 2017-2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.19  
Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang,  
Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2017-2021 (satuan %)

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Tangerang	4,95	4,76	4,43	5,22	5,93
2	Provinsi Banten	5,45	5,24	5,09	5,92	6,66
3	Indonesia	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, 2022

Pada Tahun 2021, Tingkat kemiskinan Kota Tangerang mencapai 5,93% lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 6,66% dan lebih rendah dari nasional yang mencapai 9,71%. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemiskinan Kota Tangerang lebih baik dari Provinsi Banten dan nasional.

### **Ketenagakerjaan dan Pengangguran**

Indikator ketenagakerjaan yang bisa digunakan untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu adalah Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK). Secara khusus APAK sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bisa diartikan sebagai bagian dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Secara formulasi TPAK bisa dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dikali seratus.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Berikut ini diuraikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Tangerang Tahun 2018-2021.

Tabel 3.20  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Kota Tangerang Tahun 2018-2021

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)
2018	63,67
2019	65,70
2020	64,97
2021	64,52

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2021

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, terlihat bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir (Tahun 2018-2021) nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) mengalami fluktuasi di 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Tahun 2021 nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) untuk Kota Tangerang sebesar 64,52%, turun dari tahun sebelumnya 64,97%. Angka tersebut menggambarkan dari 100 orang yang termasuk ke dalam Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) pada Tahun 2021 terdapat sekitar 64 orang yang merupakan angkatan kerja. Berikut ini diuraikan jumlah penduduk bekerja menurut jenis lapangan usaha (kelompok sektor) Kota Tangerang pada Tahun 2021.

Tabel 3.21  
Penduduk Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha  
(Kelompok Sektor) Kota Tangerang Tahun 2021

Lapangan Usaha (3 Sektor)	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian	6.564	1.513	8.077
Manufaktur	211.192	79.304	290.496
Jasa-jasa	435.685	303.925	739.610
Jumlah	653.441	384.742	1.038.183

Sumber: BPS Sakernas, Agustus 2021

Berikut ini diuraikan kondisi jumlah penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama Kota Tangerang Tahun 2021.

Tabel 3.22  
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama  
Kota Tangerang Tahun 2021

STATUS PEKERJAAN UTAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	FORMAL	NON FORMAL
berusaha sendiri	150.181	80.505	230.686	667.531	370.652
berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tida	26.228	17.053	43.281		
berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	19.325	4.578	23.903		
buruh/karyawan/pegawai	412.770	230.858	643.628		
pekerja bebas di pertanian	-	-	-		
pekerja bebas di nonpertanian	27.170	13.830	41.000		
pekerja keluarga/tidak dibayar	17.767	37.918	55.685		
Jumlah	653.441	384.742	1.038.183		

Sumber: BPS Sakernas, Agustus 2021

Berikut ini diuraikan kondisi angkatan kerja menurut pendidikan dan jenis kegiatan Kota Tangerang Tahun 2021.

Tabel 3.23  
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan, dan Jenis Kegiatan  
Kota Tangerang Tahun 2021

PENDIDIKAN DITAMATKAN	JENIS KEGIATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	ANGKATAN KERJA
<= SD	Bekerja	97.661	45.631	143.292	153.400
	Pengangguran	5.346	4.762	10.108	
SMP	Bekerja	106.089	63.859	169.948	187.985
	Pengangguran	10.491	7.546	18.037	
SMA Umum	Bekerja	198.587	101.459	300.046	339.842
	Pengangguran	26.134	13.662	39.796	
SMA Kejuruan	Bekerja	126.818	115.121	241.939	328.097
	Pengangguran	14.436	71.722	86.158	
Diploma I/II/III	Bekerja	24.596	21.194	45.790	47.938
	Pengangguran	1.250	898	2.148	
Universitas	Bekerja	99.690	80.877	180.567	187.650
	Pengangguran	4.653	2.430	7.083	
Jumlah	Bekerja	653.441	384.742	1.038.183	1.141.720
	Pengangguran	62.310	41.227	103.537	

Sumber: BPS Sakernas, Agustus 2021

Salah satu pendekatan yang sering dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan adalah optimalisasi kemampuan dan keterampilan berdasarkan kebutuhan serta penyesuaian jenis lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja. Lowongan kerja adalah lowongan yang disediakan oleh pemberi kerja (perusahaan) untuk diisi oleh pencari kerja yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Kesempatan kerja tercipta, jika lowongan kerja yang tersedia dapat diisi oleh pencari kerja. Pada tahun 2021, di Kota Tangerang terdapat 14.190 orang pencari kerja, sedangkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 12.19 orang.

Tabel 3.24  
Jumlah Pencari Kerja dan Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan  
(Menurut Tingkat Pendidikan) di  
Kota Tangerang Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja			Lowongan Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	0	0	0	0	0	0
2	SD	24	12	36	0	1	1
3	SLTP	163	147	310	38	36	74
4	SLTA & SMK	5.826	5.320	11.146	5.137	4.799	9.936
6	Diploma/Sarjana Muda	200	187	387	123	127	250
7	Sarjana	1.126	1.157	2.283	927	995	1.922
8	Pasca Sarjana (S2)	11	17	28	5	4	9
Tahun 2021		7.350	6.840	14.190	6.230	5.962	12.192
Tahun 2020		8.322	7.170	15.492	8.981	7.609	16.590
Tahun 2019		7.562	7.420	14.982	11.869	10.935	22.804
Tahun 2018		7.745	8.318	16.063	8.713	8.875	17.588
Tahun 2017		7.072	7.200	14.281	3.576	3.943	7.646

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2021

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, berdasarkan jenis kelamin, pencari kerja pada Tahun 2021 didominasi oleh tamatan SLTA & SMK sebanyak 11.146 orang, sedangkan lowongan kerja yang tersedia untuk lulusan SLTA & SMK sebanyak 9.936 lowongan. Pencari kerja berjenis kelamin laki-laki dan lowongan kerja laki-laki masih lebih banyak dibanding pencari kerja berjenis kelamin perempuan dan lowongan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kota Tangerang yang mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan masih didominasi oleh laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi belum maksimal di Kota Tangerang. Implikasinya banyak perempuan yang masih menjadi kelompok bukan angkatan kerja. Mengurus rumah tangga, adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan perempuan. Diduga pula, pergeseran nilai-nilai budaya terutama dalam hal bekerja secara ekonomis, yang terjadi di Kota Tangerang belum bergerak cepat. Istilah bahwa yang mencari pekerjaan (mencari nafkah) adalah kewajiban laki-laki masih cukup kuat berakar dalam budaya kita.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka

yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Secara formulasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (bukan karena alasan kekurangan fisik) dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yaitu 15 tahun sampai dengan 64 tahun ke atas. Kondisi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang pada periode Tahun 2017-2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.25  
Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Kota Tangerang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	penduduk usia kerja	Jiwa	1.611.064	1.653.871	1.686.142	1.720.320	1.769.639
2	penduduk angkatan kerja	Jiwa	1.046.999	1.088.808	1.108.057	1.130.522	1.141.720
3	penduduk angkatan kerja yang bekerja	Jiwa	972.018	1.008.127	1.029.016	1.032.958	1.038.183
4	jumlah pengangguran (angkatan kerja yang tidak bekerja)	Jiwa	74.981	80.681	79.041	97.564	103.537
5	penduduk bukan angkatan kerja	Jiwa	564.065	565.062	578.085	589.798	643.951
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,16	7,41	7,13	8,63	9,07

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, 2022

Pada Tahun 2021, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (jumlah pengangguran) di Kota Tangerang sebanyak 103.537 jiwa sedangkan jumlah angkatar kerjanya sebanyak 1.141.720 jiwag, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 9,07%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 9 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2021 mencapai 9,07% dan mengalami peningkatan sebesar 0,44% (dengan laju pertumbuhan mencapai 5,10%) dari Tahun 2020 yang mencapai 8,63%. Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 dan 2021 masih dirasakan terhadap sektor ketenagakerjaan, seperti banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi dengan melakukan PHK atau merumahkan karyawan tanpa dibayar (unpaid). Pada Tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang sebesar 9,04%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 9 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kondisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia pada periode Tahun 2017-2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.26  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2017-2021 (satuan : persen)

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Tangerang	7,16	7,41	7,13	8,63	9,07
2	Provinsi Banten	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98
3	Indonesia	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, 2022

Pada Tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang mencapai 9,07% lebih tinggi dari Provinsi Banten yang mencapai 8,98% dan lebih tinggi dari nasional yang mencapai 6,49%. Kondisi ini mencerminkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang lebih buruk dari Provinsi Banten dan nasional.

### **Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**

Indeks Gini (Gini Rasio) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai Indeks Gini mendekati satu

maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol nilainya maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif, berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi indeks gini Kota Tangerang dan Provinsi Banten pada periode Tahun 2017-2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.27  
Indeks Gini Kota Tangerang dan Provinsi Banten  
Tahun 2017-2021

TAHUN	INDEKS GINI (POIN)	
	KOTA TANGERANG	PROVINSI BANTEN
2017	0,370	0,379
2018	0,360	0,367
2019	0,320	0,361
2020	0,339	0,365
2021*	0,343	0,363

Sumber: BPS Provinsi Banten dan Kota Tangerang, 2022

\*) angka sementara

Pada Tahun 2021, indeks gini (gini rasio) Kota Tangerang mengalami peningkatan yaitu dari 0,339 poin pada Tahun 2020 menjadi 0,343 poin pada Tahun 2021. Kondisi mencerminkan semakin memburuknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang. Kondisi ini dipicu oleh terjadinya Pandemi Covid 19 dan resesi ekonomi yang melanda sejak Tahun 2020. Indeks gini Kota Tangerang Tahun 2021 tersebut juga mengandung arti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tangerang pada Tahun 2021 dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”.

Pada Tahun 2021, indeks gini (gini rasio) Kota Tangerang mencapai 0,343 poin lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 0,363 poin. Kondisi ini mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang lebih baik dari Provinsi Banten.

## **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
2. pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;
3. pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
4. pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
5. pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people) yang diukur dari tiga indikator komposit yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu kesehatan (sebagai ukuran longevity), pendidikan (sebagai ukuran knowledge) dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran living standards). Bagi pembangunan suatu wilayah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara dan mengukur kinerja Pemerintah.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pengetahuan, dan pendapatan. Mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Badan

Pusat Statistik (BPS), indikator yang dipilih untuk mengukur IPM, adalah sebagai berikut:

1. indeks kesehatan diukur dari angka harapan hidup;
2. indeks pengetahuan/pendidikan diukur dari angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah;
3. indeks pengeluaran diukur dari tingkat pengeluaran perkapita setahun yang disesuaikan.

Hasil perhitungan menggunakan indeks artinya rasio (angka perbandingan) yang mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik. United Nations for Development Program disingkat UNDP (1990) mengelompokkan negara berdasarkan tingkat pembangunan manusianya. Tingkat pembangunan manusia yang rendah (low human development), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,59. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (medium human development), apabila memiliki nilai IPM antara 0,59 sampai 0,70. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (high human development), bila memiliki nilai IPM antara 0,70 sampai 1. Artinya, semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik yang berkorelasi dengan kebijakan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Berikut ini klasifikasi status pembangunan manusia:

NILAI IPM	KLASIFIKASI
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
$\geq 80$	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Pembangunan manusia yang meliputi : pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat merupakan program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan misi pembangunan daerah Kota Tangerang. Melalui pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus dapat diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28  
Realisasi Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Indeks Kesehatan (IK)	Point	79,05	79,15	79,34	79,38	79,38
1.	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71,38	71,45	71,57	71,60	71,60
	Indeks Harapan Hidup (IHH)	Point	79,05	79,15	79,34	79,38	79,38
II.	Indeks Pendidikan (IP)	Point	71,63	73,45	73,94	74,11	74,63
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,44	13,83	13,84	13,85	13,87
	Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS)	Point	74,67	76,83	76,89	76,94	77,06
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,29	10,51	10,65	10,69	10,83
	Indeks Rata-rata Lama Sekolah (IRLS)	Point	68,60	70,07	71,00	71,27	72,20
III.	Indeks Daya Beli (IDB)	Point	80,64	81,37	82,24	81,46	81,65
1.	Pengeluaran per Kapita Setahun yang Disesuaikan (PPP/DB)	Rp. Ribu	14.104	14.443	14.860	14.484	14.575
	Indeks Daya Beli (IDB)	Point	80,64	81,37	82,24	81,46	81,65
IV.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	77,01	77,92	78,43	78,25	78,50
	Laju Pertumbuhan IPM	%	0,26	1,19	0,66	-0,23	0,31
	Pertumbuhan IPM	Point	0,20	0,91	0,51	-0,18	0,24

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2022

Selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, IPM Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari 77,01 point pada Tahun 2017 meningkat menjadi 78,50 point pada Tahun 2021. Namun demikian pada Tahun 2020, IPM Kota Tangerang mengalami penurunan sekitar -0,18 point dari Tahun 2019 menjadi 78,25 point. Kondisi ini disebabkan dampak Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang terjadi sejak Tahun 2020.

Indeks harapan hidup yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM adalah angka harapan hidup dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 85 tahun. Angka harapan hidup menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin panjang. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya. Angka harapan hidup (usia harapan hidup saat lahir) Kota Tangerang menunjukkan angka yang meningkat selama periode Tahun 2017-2021, yaitu dari 71,38 tahun pada Tahun 2017 meningkat menjadi 71,60 pada Tahun 2021. Artinya, rata-rata bayi yang lahir di Kota

Tangerang pada Tahun 2021 memiliki harapan hidup hingga usia 71,60 tahun.

Indeks pengetahuan menggambarkan partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Indeks pengetahuan Kota Tangerang selama periode Tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari 71,63 point pada Tahun 2017 meningkat menjadi 74,63 pada Tahun 2021. Indeks pengetahuan atau pendidikan dihitung berdasarkan indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks harapan lama sekolah adalah angka harapan lama sekolah dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 18 tahun. Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang program wajib belajar adalah pada usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang. Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, angka harapan lama sekolah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari 13,44 tahun pada Tahun 2017 menjadi 13,87 tahun pada Tahun 2021. Artinya, pada Tahun 2021 setiap penduduk Kota Tangerang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,87 tahun (setara dengan kuliah semester I-II). Sedangkan indeks rata-rata lama sekolah adalah angka rata-rata lama sekolah dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 15 tahun. Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dalam periode Tahun 2017-2021, angka rata-rata lama sekolah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari 10,29 tahun pada Tahun 2017 menjadi 10,83 tahun pada Tahun 2021. Artinya bahwa pada Tahun 2021 penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Tangerang rata-rata telah menjalani pendidikan formal selama 10,83 tahun (setara dengan kelas I SLTA).

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk, sebagai dampak membaiknya ekonomi. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), BPS menggunakan indikator yang dikenal dengan pengeluaran riil per kapita setahun disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran

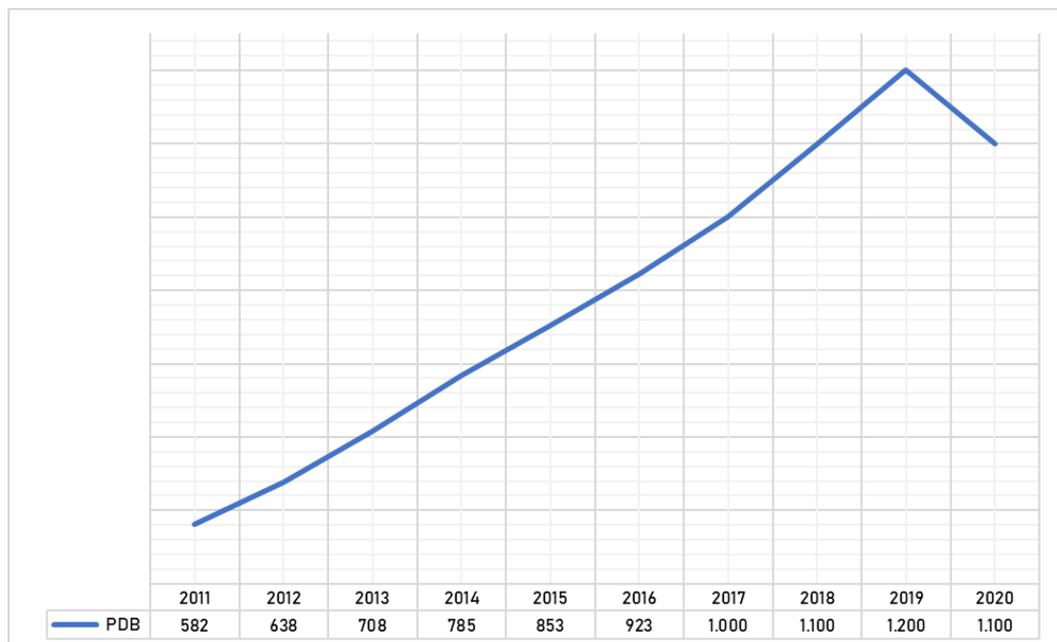
per kapita dan paritas daya beli. Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, angka pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dari Rp. 14.104.000 pada Tahun 2017 menjadi Rp. 14.575.000 pada Tahun 2021. Namun demikian, pada Tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi, angka pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami penurunan dari Rp. 14.860.000 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 14.484.000 pada Tahun 2020.

### Profil Ekonomi Kreatif Product Domestic Brutto (Nilai)

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), dan barang dan jasa yang dimaksud adalah produk dari ide dan gagasan yang diaktualisasikan menjadi barang dan jasa.

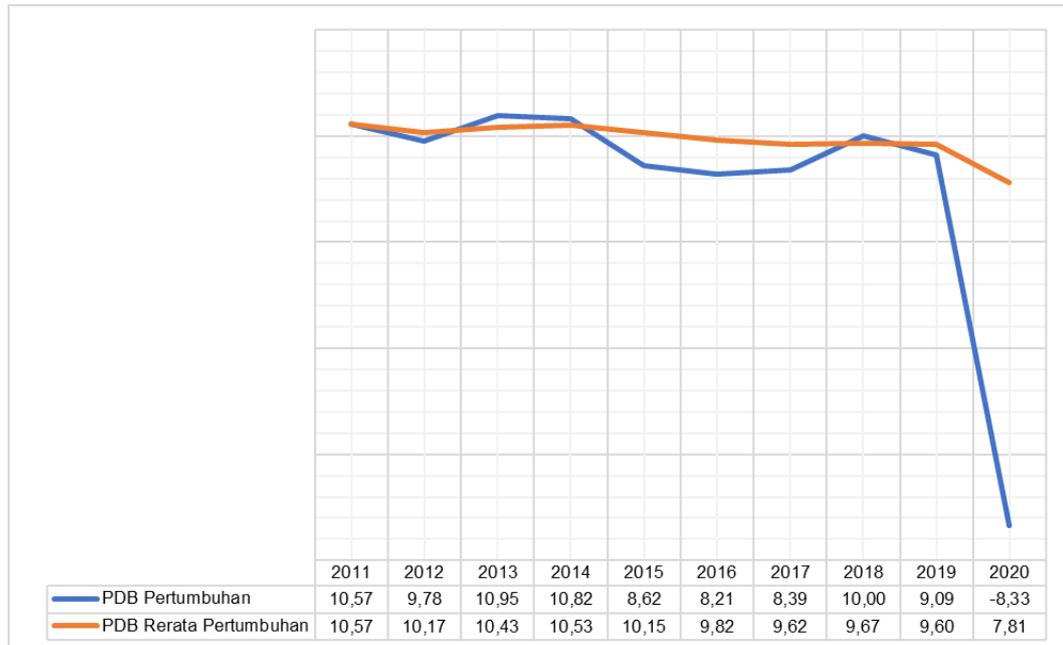
Berdasarkan data yang dipublikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020, dapat dijelaskan bahwa PDB Ekonomi Kreatif menunjukan laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi konvensional (ekstraktif), kondisi ini di jelaskan pada gambar 2.4, dimana laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif cenderung stabil di angka 7,81.

Gambar 3.3  
Product Domestic Brutto Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)



Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020)

Gambar 3.4  
Laju Pertumbuhan Product Domestic Brutto Ekonomi Kreatif  
( dalam satuan %)



Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020)

Selain laju pertumbuhan yang cenderung lebih baik dan stabil dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi konvensional, PDB Ekonomi kreatif juga memiliki kontribusi yang stabil terhadap PDB Indonesia di angka (7,66-9,41)%.

## **BAB 4**

# **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada jangka waktu 10 tahun terakhir ini, PDRB Lapangan Usaha ADHK per kapita di Kota Tangerang naik di setiap tahunnya, hal ini sejalan dengan laju pertumbuhannya yang terus meningkat. Namun perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan social bagi pekerja.

**Tujuan Kota Tangerang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua** adalah salah satu agenda utama dalam pembangunan kota yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang daerah yang direncanakan, dilaksanakan, dimoniting, dan evaluasi untuk pengambilan keputusan.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama.

Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600

juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan, juga perlu ditingkatkan.

Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”.

Pemerintah Indonesia akan mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai badan koordinator untuk penerapan SDGs yang bersifat lintas sektor.

**4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2019-2024 yaitu meningkatnya Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita per tahun menjadi lebih sekitar 58 juta/orang/tahun.**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sejak tahun 2017-2021 Pada dasarnya Kota Tangerang memiliki kinerja ekonomi yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator berikut;

1. nilai pendapat perkapita masyarakat Kota Tangerang yang menunjukkan kinerja peningkatan disetiap tahunnya, bahkan pada posisi akhir tahun 2021 mencapai 55,81 juta/jiwa/tahun (ADHK) dan 78,63 juta/jiwa/tahun (ADHB), kondisi ini setara

dengan 1,46 kali lebih besar dari pendapat perkapita masyarakat Provinsi Banten atau 1,36 kali lebih besar dari pendapatan perkapita masyarakat Indonesia pada umumnya

2. laju pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat Kota Tangerang yang **mengalami fluktuasi**, kondisi ini disebabkan oleh laju pertumbuhan PDRBnya yang juga mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, sedangkan jumlah penduduk justru mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Meskipun berdasarkan nilainya menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Kota Tangerang lebih tinggi dari nilai pendapatan perkapita masyarakat skala Provinsi Banten bahkan skala nasional, namun berdasarkan laju pertumbuhannya justru menunjukkan kinerja yang fluktuatif, hal ini mengindikasikan bahwa struktur dan fundamental ekonomi Kota Tangerang yang mengalami perlambatan (*deminishing return to law*), sejak tahun 2011, bersama-sama dengan perlambatan yang juga dialami oleh struktur dan fundamental ekonomi Provinsi Banten dan Nasional.

Selain itu didalam pendapatan perkapita yang besar masih terdapat komponen *time value of money* dan inflasi, dimana didalamnya terdapat disparitas harga yang lebih sering dikenal dengan Indeks Harga Implisit.

#### **Kesimpulannya :**

1. Meskipun pendapatan perkapita riil masyarakat Kota Tangerang pada tahun 2021 lebih tinggi dari pendapatan perkapita masyarakat skala Provinsi Banten dan Nasional, namun Kota Tangerang belum mampu memenuhi target SDG yaitu 58 juta/orang/tahun di tahun 2020. Kota Tangerang baru mampu mencapai target 55 juta/orang/tahun
2. Pemerintah Kota Tangerang belum mampu mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi perkapitanya sampai 7%, saat ini tahun 2021, Kota Tangerang hanya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi perkapitanya sebesar 4,25% dengan kondisi tidak stabil (fluktuatif).

Tabel 4. 1  
Dinamika PDRB Perkapita Kota Tangerang Periode 2017-2021  
Sumber : Badan Pusat Statistik

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB LU ADHK Kota Tangerang	Juta	101.274.660	106.283.620	110.556.398	102.898.229	106.705.227
PDRB LU ADHK Provinsi Banten	Juta	410.137.000	433.782.710	456.616.900	441.295.770	460.739.570
PDRB LU ADHK Nasional	Juta	9.531.259.100	10.002.892.800	10.498.610.400	10.331.662.400	10.669.352.700
Usia Kerja yang Bekerja Kota Tangerang	Jiwa	2.139.891	2.185.304	2.229.901	1.895.486	1.911.914
Usia Kerja yang Bekerja Provinsi Banten	Jiwa	12.448.160	12.689.736	12.927.316	11.904.562	12.061.475
Usia Kerja yang Bekerja Nasional	Jiwa	261.890.900	261.890.900	261.890.900	261.890.900	261.890.900
Pendapatan Perkapita/Penduduk Kota Tangerang	Juta/Jiwa	47,33	48,64	49,58	54,29	55,81
Pendapatan Perkapita/Penduduk Provinsi Banten	Juta/Jiwa	32,95	34,18	35,32	37,07	38,20
Pendapatan Perkapita/Penduduk Nasional	Juta/Jiwa	36,39	38,19	40,09	39,45	40,74
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Kota Tangerang	Persen		2,77	1,94	9,49	2,81
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Provinsi Banten	Persen		3,75	3,33	4,95	3,05
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Nasional	Persen		4,95	4,96	-1,59	3,27
PDRB LU ADHB Kota Tangerang	Juta	149.005.560	161.359.650	171.732.446	143.661.691	150.330.292
PDRB LU ADHB Provinsi Banten	Juta	563.597.700	613.804.410	661.651.620	626.437.470	665.921.880
PDRB LU ADHB Nasional	Juta	11.863.111.800	12.958.361.200	13.827.346.500	13.458.773.400	14.779.575.400
Usia Kerja yang Bekerja Kota Tangerang	Jiwa	2.139.891	2.185.304	2.229.901	1.895.486	1.911.914
Usia Kerja yang Bekerja Provinsi Banten	Jiwa	12.448.160	12.689.736	12.927.316	11.904.562	12.061.475
Usia Kerja yang Bekerja Nasional	Jiwa	261.890.900	261.890.900	261.890.900	261.890.900	261.890.900
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Kota Tangerang	Juta/Jiwa	69,63	73,84	77,01	75,79	78,63
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Provinsi Banten	Juta/Jiwa	45,28	48,37	51,18	52,62	55,21
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Nasional	Juta/Jiwa	45,30	49,48	52,80	51,39	56,43
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Kota Tangerang	Persen		6,04	4,30	-1,59	3,74
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Provinsi Banten	Persen		6,83	5,81	2,81	4,92
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Nasional	Persen		9,23	6,71	-2,67	9,81

Keterangan :  
 Lambat  
 Sedang  
 Cepat

**4.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam RPJMN Periode 2019-2024 yaitu Pertumbuhan PDRB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2024**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sejak tahun 2017-2022 Pada dasarnya Kota Tangerang memiliki kinerja ekonomi yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator berikut;

1. nilai pendapat perkapita orang bekerja di Kota Tangerang yang menunjukkan fluktuasi di setiap tahunnya, bahkan pada posisi akhir tahun 2021 mencapai 102,78 juta/jiwa/tahun (ADHK) dan 144,80 juta/jiwa/tahun (ADHB), kondisi ini setara dengan 1,27 kali lebih besar dari pendapat perkapita orang bekerja di Provinsi Banten atau 1,26 kali lebih besar dari pendapatan perkapita orang bekerja di Indonesia pada umumnya.
2. laju pertumbuhan pendapatan perkapita orang bekerja di Kota Tangerang yang **mengalami fluktuasi**, kondisi ini disebabkan oleh laju pertumbuhan PDRBnya yang terus menurun di setiap tahunnya, sedangkan jumlah orang bekerja justru mengalami peningkatan jumlah (bukan persentase) di setiap tahunnya.

Meskipun berdasarkan nilainya menunjukkan bahwa pendapatan perkapita orang bekerja di Kota Tangerang lebih tinggi dari nilai pendapatan perkapita orang bekerja skala Provinsi Banten bahkan skala nasional, namun berdasarkan laju pertumbuhannya justru menunjukkan kinerja yang fluktuatif, hal ini mengindikasikan bahwa struktur dan fundamental ekonomi Kota Tangerang yang mengalami perlambatan (*deminishing return to law*), sejak tahun 2011, bersama-sama dengan perlambatan yang juga dialami oleh struktur dan fundamental ekonomi Provinsi Banten dan Nasional.

Selain itu didalam pendapatan perkapita yang besar masih terdapat dalamnya adalah tim evaluate of money dan inflasi, dimana didalamnya terdapat disparitas harga yang lebih sering dikenal dengan Indeks Harga Implisit.

**Kesimpulannya :**

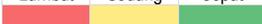
1. Meskipun pendapatan perkapita riil orang bekerja di Kota Tangerang pada tahun 2021 lebih tinggi dari pendapatan perkapita orang bekerja skala Provinsi Banten dan Nasional, namun Kota Tangerang sudah melampaui target SDG yaitu 1,84% di tahun 2020, dimana di tahun yang sama Kota Tangerang sudah mampu mencapai target 3,18%.
2. Pemerintah Kota Tangerang belum mampu mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi perkapita orang bekerjanya sampai 3,7%-4,5% pada tahun dasar 2020 dinilai 1,84%, saat ini tahun 2021 Kota Tangerang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi perkapita orang bekerjanya sebesar 3,18% dengan kondisi tidak stabil (fluktuatif).

Tabel 4. 2  
Dinamika PDRB Riil Per Orang yang Bekerja Periode 2017-2024  
Sumber : Badan Pusat Statistik

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB LU ADHK Kota Tangerang	Juta	101.274.660	106.283.620	110.556.398	102.898.229	106.705.227
PDRB LU ADHK Provinsi Banten	Juta	410.137.000	433.782.710	456.616.900	441.295.770	460.739.570
PDRB LU ADHK Nasional	Juta	9.531.259.100	10.002.892.800	10.498.610.400	10.331.662.400	10.669.352.700
Usia Kerja yang Bekerja Kota Tangerang	Jiwa	972.018	1.008.127	1.029.016	1.032.958	1.038.183
Usia Kerja yang Bekerja Provinsi Banten	Jiwa	5.077.400	5.332.496	5.562.846	5.552.172	5.698.344
Usia Kerja yang Bekerja Nasional	Jiwa	121.022.423	126.282.186	128.755.271	128.454.184	131.050.523
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Kota Tangerang	Juta/Jiwa	104,19	105,43	107,44	99,62	102,78
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Provinsi Banten	Juta/Jiwa	80,78	81,35	82,08	79,48	80,85
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Nasional	Juta/Jiwa	78,76	79,21	81,54	80,43	81,41
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Kota Tangerang	Persen		1,19	1,91	- 7,28	3,18
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Provinsi Banten	Persen		0,71	0,91	- 3,17	1,73
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Nasional	Persen		0,58	2,94	- 1,36	1,22
PDRB LU ADHB Kota Tangerang	Juta	149.005.560	161.359.650	171.732.446	143.661.691	150.330.292
PDRB LU ADHB Provinsi Banten	Juta	563.597.700	613.804.410	661.651.620	626.437.470	665.921.880
PDRB LU ADHB Nasional	Juta	11.863.111.800	12.958.361.200	13.827.346.500	13.458.773.400	14.779.575.400
Usia Kerja yang Bekerja Kota Tangerang	Jiwa	972.018	1.008.127	1.029.016	1.032.958	1.038.183
Usia Kerja yang Bekerja Provinsi Banten	Jiwa	5.077.400	5.332.496	5.562.846	5.552.172	5.698.344
Usia Kerja yang Bekerja Nasional	Jiwa	121.022.423	126.282.186	128.755.271	128.454.184	131.050.523
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Kota Tangerang	Juta/Jiwa	153,30	160,06	166,89	139,08	144,80
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Provinsi Banten	Juta/Jiwa	111,00	115,11	118,94	112,83	116,86
Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Nasional	Juta/Jiwa	98,02	102,61	107,39	104,77	112,78
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Kota Tangerang	Persen		4,41	4,27	- 16,66	4,12
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Provinsi Banten	Persen		3,70	3,33	- 5,14	3,58
Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita/Tenaga Kerja Nasional	Persen		4,68	4,66	- 2,44	7,64

Keterangan :

Lambat    Sedang    Cepat



- 4.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam RPJMN Periode 2019-2024 yaitu Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%) dan akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%)**

Berdasarkan aspek tenaga kerjanya, Kota Tangerang berhasil melampaui target SDGS nasional yang menargetkan 51% tenaga kerja formal di pasar tenaga kerja lokal pada periode 2024, sedangkan Kota Tangerang pada periode 2021 sudah mencapai 64,30%, selain itu Persentase Tenaga Kerja formal Kota Tangerang sejak tahun 2011 selalu berada di atas 51%. Berikut tabel persentase tenaga kerja formal Kota Tangerang periode 2019-2021.

Tabel 4. 3  
 Persentase Tenaga Kerja Formal Periode 2019-2021  
 Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021
Pekerja Formal	Jiwa	744.959	654.559	667.537
Total bekerja	Jiwa	1.029.016	1.030.255	1.038.183
Kontribusi	Persen	72,40	63,53	64,30

Sumber : BPS Kota Tangerang Tahun 2011-2021 (Diolah)

Sedangkan dari aspek layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah yang ditarget SDGs yang direduksi menjadi target RPJMN mencapai 25% pada tahun 2019, mengindikasikan capaian di atas target SDGs atau RPJM, dimana akses layanan kredit UMKM Kota Tangerang mencapai 34,28% pada tahun 2021, dengan rincian 10,54% kredit mikro, 27,21% kredit kecil, 62,25% kredit menengah. Berikut adalah tabel 4.4 yang menyajikan

prosentase akses kredit UMKM Kota Tangerang terhadap periode 2018-2020.

Tabel 4. 4  
Akses Layanan Kredit UMKM Periode 2019-2021  
Sumber : Badan Pusat Statistik

WILAYAH	SATUAN	2018	2019	2020
Kota Tangerang	Juta	15.071.717	16.540.902	15.824.412
Provinsi Banten	Juta	45.316.877	49.002.473	46.163.983
Akses Kredit UMKM Kota Tangerang	Persen	33,26	33,76	34,28

Sumber : Bank Indonesia (2021)

#### Kesimpulannya :

1. Dari aspek serapan tenaga kerja formal, Kota Tangerang sudah melebihi target SDGs dan RPJMN, dimana capaian tenaga kerja formal Kota Tangerang yang mencapai 64,30%, sedangkan target nasional berada pada 51%. Meskipun capaian 64,30% merupakan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya
2. Dari aspek akses layanan kredit UMKM, Kota Tangerang mampu mengakses 34,28% dari kredit UMKM di Provinsi Banten, dengan 10,54% kredit mikro, 27,21% kredit kecil, 62,25% kredit menengah.

Secara umum kesimpulan diatas mengindikasikan bahwa ekonomi di Kota Tangerang mengalami dinamika yang positif meskipun dalam proses pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang juga dialami oleh pemerintah Provinsi Banten, maupun Pemerintah Pusat.

**4.4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam RPJMN Periode 2019-2024 yaitu terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun**

Berdasarkan data yang tersedia yang dipublikasi oleh BPS, dapat diketahui bahwa data yang tersedia tidak lengkap, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sehingga data yang tersedia dan layak di olah hanya data tahun 2020-2021, dimana serapan tenaga formal mencapai 12.978 jiwa, sedangkan serapan tenaga kerja keseluruhannya adalah 7.928 jiwa.

Tabel 4. 5  
Terciptanya Kesempatan Kerja Sebesar 10 Juta Selama 5 Tahun

<b>PERTAMBAHAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Serapan Pekerja Formal	Jiwa	- 90.400	12.978
Serapan Total Pekerja	Jiwa	1.239	7.928

Sumber : BPS Kota Tangerang Tahun 2020-2021 (Diolah)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.5 diatas, dapat dijelaskan bahwa telah terjadi penambahan serapan tenaga kerja formal di Kota Tangerang sebesar 12.978 jiwa pada tahun 2021 dan disaat yang bersamaan justru terjadi pengurangan tenaga kerja tidak formal sebesar 5.050 jiwa, dimana serapan nasional di targetkan 10 juta selama lima tahun terakhir.

Agenda lainnya dalam hal pencapaian pekerjaan tetap dan produktif yang di implementasikan ke dalam RPJMN sebagai target penurunan tingkat pengangguran dalam rentang 3,6% - 4,3% dengan tahun dasar 2020 sebesar 7,07%, maka dapat diketahui bersama, bahwa Kota Tangerang pada periode 2021 masih berada di bawah kondisi yang diharapkan nasional, yaitu 9,07% pengangguran terbuka, sedangkan target nasional 7,07% pada tahun 2021, target ini, juga belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah

Provinsi Banten (8,98%) meskipun Pemerintah Pusat mampu memenuhi target dengan capaian 6,49% (diatas target nasinal yaitu 7,07%).

Tabel 4. 6  
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka  
Menjadi (4,6-4,3)% pada Tahun 2023

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja Tidak Bekerja Kota Tangerang	Jiwa	74.981	80.681	79.041	97.564	103.537
Angkatan Kerja Tidak Bekerja Provinsi Banten	Jiwa	519.563	496.732	490.808	661.061	562.310
Angkatan Kerja Tidak Bekerja Nasional	Jiwa	6.898.796	7.104.424	9.767.754	9.102.052	8.425.931
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang	%	7,16	7,41	7,13	8,63	9,07
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten	%	9,28	8,52	8,11	10,64	8,98
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Sumber : BPS Kota Tangerang Tahun 2020-2021 (Diolah)

### Kesimpulannya

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dinamika ekonomi di Kota Tangerang mengalami dinamika positif meskipun dalam proses pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang juga dialami oleh pemerintah Provinsi Banten, maupun Pemerintah Pusat, hal ini ditunjukkan dengan jumlah serapan tenaga kerja formal yang meningkat, meskipun jumlah pemutusan hubungan kerja tenaga kerja tidak formal meningkat.

- 4.5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan sasaran global pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal yang diaplikasikan menjadi sasaran nasional dalam RPJMN Periode 2019-2024 yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 4,5% terhadap PDB pada tahun 2020 (2020:4,0%) dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 17 juta pada tahun 2024 (2020: 4,05 juta).**

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data yang dipublikasi oleh BPS Kota Tangerang Periode 2017-2021, dapat diketahui bahwa untuk memenuhi target nasional 4,5% kontribusi Sektor Pariwisata dalam struktur ekonomi pada tahun 2024, tidaklah mudah, mengingat pariwisata merupakan urusan pilihan, dimana selain tidak semua wilayah memiliki potensi pariwisata, selera konsumen juga sangat menentukan arah pariwisata ke depannya. Pada periode ini Kota Tangerang hanya mampu berkontribusi 1,63% terhadap struktur dan fundamental ekonomi wilayah, masih di bawah kontribusi Sektor Pariwisata Provinsi Banten (2,46%) dan Sektor Pariwisata Nasional (2,91%). Data ini tersaji pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4. 7  
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Menjadi 4,5%  
(Skala Nasional) Pada Tahun 2024

PARAMETER	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB ADHK Pariwisata Kota Tangerang	Miliar	1.528	1.638	1.746	1.680	1.740
Nilai PDRB ADHK Pariwisata Provinsi Banten	Miliar	9.925	10.664	11.446	10.863	11.333
Nilai PDRB ADHK Pariwisata Nasional	Miliar	298.130	315.069	333.305	299.122	310.755
Pertumbuhan PDRB ADHK Pariwisata Kota Tangerang	Persen	8,90	7,22	6,62	- 3,82	3,57
Pertumbuhan PDRB ADHK Pariwisata Provinsi Banten	Persen	8,28	7,45	7,33	- 5,09	4,33
Pertumbuhan PDRB ADHK Pariwisata Nasional	Persen	5,41	5,68	5,79	- 10,26	3,89
Kontribusi PDRB ADHK Pariwisata Kota Tangerang	Persen	1,51	1,54	1,58	1,63	1,63
Kontribusi PDRB ADHK Pariwisata Provinsi Banten	Persen	2,42	2,46	2,51	2,46	2,46
Kontribusi PDRB ADHK Pariwisata Nasional	Persen	3,13	3,15	3,17	2,90	2,91

Keterangan :

Sumber : BPS Kota Tangerang Tahun 2011-2021 (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data yang dipublikasi oleh BPS Kota Tangerang Periode 2015-2021, dapat diketahui bahwa untuk memenuhi target nasional 17 Juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024, tidaklah mudah, mengingat pariwisata merupakan urusan pilihan, dimana selain tidak semua wilayah memiliki potensi pariwisata, selera konsumen juga sangat menentukan arah pariwisata ke depannya. Pada periode tahun 2021 ini, Kota Tangerang hanya mampu berkontribusi 84.470 jiwa kunjungan ke Kota Tangerang. Data ini tersaji pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4. 8  
Meningkatnya Jumlah Wisatawan Mancanegara Menjadi 17 Juta Skala Nasional Pada Tahun 2024

VARIABEL	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan ke Kota Tangerang	Jiwa	106.290	89.000	315.660	310.040	394.440	84.470
Jumlah Kunjungan ke Provinsi Banten	Jiwa	367.620	302.920	441.590	454.570	465.630	100.000
Distribusi Kunjungan ke Kota Tangerang	Persen	106.290	89.000	315.660	310.040	394.440	84.470
Distribusi Kunjungan ke Provinsi Banten	Persen	367.620	302.920	441.590	454.570	465.630	100.000
Pertumbuhan Kunjungan ke Kota Tangerang	Persen	106.290	89.000	315.660	310.040	394.440	84.470
Pertumbuhan Kunjungan ke Provinsi Banten	Persen	367.620	302.920	441.590	454.570	465.630	100.000

Keterangan :

Sumber : BPS Kota Tangerang Tahun 2011-2021 (Diolah)

# BAB 5

## PENUTUP

---

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan regulasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan interpretasi Negara Republik Indonesia terhadap SDGs yang konversi dari aspek waktunya menjadi RPJMN, maka dapat disimpulkan beberapa hal

1. tidak seluruh target global di jadikan TPB, beberapa target global SDGs tidak diterjemahkan menjadi komponen TPB dalam RPJMN,
2. beberapa TPB yang dapat dianalisa di Kota Tangerang menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut
  - ekonomi Kota Tangerang merupakan ekonomi dengan postur terbesar di Provinsi Banten 106 triliun pada tahun 2021
  - ekonomi Kota Tangerang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap salah satu sektor utama, yaitu sektor industri (39,10%)
  - ekonomi Kota Tangerang mengalami pelemahan secara signifikan (laju pertumbuhan ekonomi yang melemah) dari 7,39% pada tahun 2011 menjadi 3,70% pada tahun 2021
  - ekonomi yang semakin tidak berdaya saing dengan ICOR yang tinggi (10,23)
  - ekonomi yang memiliki sektor alternatif yang besar namun sulit dikendalikan karena mekanisme pasar yaitu sektor transportasi
3. penjelasan diatas membantu menjelaskan capaian TPB Kota Tangerang khususnya pada pilar ekonomi, yaitu
  - pendapatan perkapita penduduk Kota Tangerang melebihi pendapatan perkapita penduduk Provinsi Banten, bahkan nasional, meskipun masih di bawah

- target RPJMN yaitu 55 juta/orang/tahun (target : 58 juta/orang/tahun);
- stabilitas pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk Kota Tangerang cenderung **fluktuatif**, yaitu 4,25% (target : stabil di 7%);
  - pendapatan perkapita orang bekerja Kota Tangerang melebihi pendapatan perkapita orang bekerja di Provinsi Banten, bahkan nasional, dan sudah melampaui target RPJMN yaitu 102,78 juta/orang/tahun (target : 58 juta/orang/tahun);
  - stabilitas pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk Kota Tangerang cenderung **fluktuatif**, yaitu 3,18% (target : stabil di 3,7-4,5 %);
  - persentase pekerja formal yang sudah melampaui target global dan nasional, yaitu 64,30% (target : stabil di 51,00%);
  - serapan tenaga kerja pada tahun 2021 meningkat 7.928 jiwa dengan rincian 12.978 jiwa terserap di pekerja formal, namun pemutusan hubungan kerja non formal mencapai 5.050 jiwa;
  - penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi (3,6-4,3)% pada tahun 2024, dengan data dasar tahun 2020 sebesar 7%, pada periode ini tingkat pengangguran Kota Tangerang mencapai 9,07%, atau masih jauh dari target TPB;
  - peningkatan akses layanan kredit UMKM Kota Tangerang yang mencapai 34,28% merupakan kondisi capaian yang melampaui target yaitu 25% pada tahun 2024;
  - kontribusi sektor pariwisata Kota Tangerang yang masih jauh di bawah target TPB RPJMN yaitu 4,5%, dimana Kota Tangerang pada periode ini baru mencapai 1,63%;
  - kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 84.470 jiwa pada tahun 2020 (target nasional 17 Juta pada tahun 2024 skala nasional);

## 5.2. Saran

Sebaik di pahami bersama bahwa SDGs atau TPB bukan komponen ekonomi murni, melainkan komponen ekonomi yang bersinergi dengan urusan lainnya seperti (sosial dan lingkungan), sehingga membutuhkan intepretasi ekonomi secara utuh agar dapat menjelaskan komponen TPB Pilar Ekonomi (ekonomi - sosial - lingkungan).

Sudah saatnya Kota Tangerang beralih dari paradigma ekonomi ekstraktif (industri) menjadi ekonomi kreatif, hal ini didasarkan karena ekonomi ekstraktif (ekonomi yang selama ini berlangsung) sudah memasuki masa **deminishing return to law**, yang sulit dipulihkan dengan pendekatan yang bersifat normatif. Ekonomi kreatif sangat potensial menyelamatkan ekonomi lokal, regional, nasional, internasional. Hal ini disebabkan ekonomi kreatif tidak membutuhkan modal besar, dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan hasilnya dapat berskala lokal, regional, maupun nasional.